



salinan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 7 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk memperlancar proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu menyusun Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sesuai kebutuhan objektif dan karakteristik Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KERO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

10. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
12. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun tertentu.
13. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri dari :
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kode rekening.

Pasal 3

- (1) Kode rekening disusun sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan;
 - b. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja; dan
 - c. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan.
 - d. Susunan kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG KODE REKENING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

A. KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 DAN ORGANISASI

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1	01		Pendidikan
1	01	01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar
1	01	01. 01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar
1	01	01. 03	UPT Taman Budaya Prov. Kalbar
1	01	01. 04	UPT Museum Prov. Kalbar
1	01	01. 05	UPT Teknologi Informasi dan komunikasi Pendidikan Prov. Kalbar
1	01	01. 06	UPT Satuan Pendidkan SMA/SMK
1	01	01. 07	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pontianak
1	01	01. 08	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Pontianak
1	01	01. 09	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Pontianak
1	01	01. 10	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Pontianak
1	01	01. 11	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 5 Pontianak
1	01	01. 12	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 6 Pontianak
1	01	01. 13	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 7 Pontianak
1	01	01. 14	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 8 Pontianak
1	01	01. 15	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 9 Pontianak
1	01	01. 16	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 10 Pontianak
1	01	01. 17	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pontianak
1	01	01. 18	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Pontianak
1	01	01. 19	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 3 Pontianak
1	01	01. 20	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 4 Pontianak
1	01	01. 21	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 5 Pontianak
1	01	01. 22	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 6 Pontianak
1	01	01. 23	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 7 Pontianak
1	01	01. 24	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 8 Pontianak
1	01	01. 25	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 9 Pontianak
1	01	01. 26	UPT Satuan Pendidikan SMK Teknologi Industri Pontianak
1	01	01. 27	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Raya
1	01	01. 28	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sungai Raya
1	01	01. 29	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Sungai Raya
1	01	01. 30	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Sungai Raya
1	01	01. 31	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 5 Sungai Raya
1	01	01. 32	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sei Ambawang
1	01	01. 33	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sei Ambawang
1	01	01. 34	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Sei Ambawang
1	01	01. 35	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Rasau Jaya
1	01	01. 36	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Rasau Jaya
1	01	01. 37	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Kakap
1	01	01. 38	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sungai Kakap
1	01	01. 39	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Sungai Kakap
1	01	01. 40	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Teluk Pakedai
1	01	01. 41	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kubu
1	01	01. 42	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Kubu
1	01	01. 43	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Kubu
1	01	01. 44	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Batu Ampar
1	01	01. 45	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Batu Ampar
1	01	01. 46	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Batu Ampar

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	01	01. 47	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Bemban
1	01	01. 48	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kuala Mandor B
1	01	01. 49	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Kuala Mandor B,
1	01	01. 50	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Terentang
1	01	01. 51	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sungai Raya
1	01	01. 52	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Sungai Raya
1	01	01. 53	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kubu
1	01	01. 54	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Batu Ampar
1	01	01. 55	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Rasau Jaya
1	01	01. 56	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kuala Mandor B
1	01	01. 57	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sungai Kakap
1	01	01. 58	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Sungai Kakap
1	01	01. 59	UPT Satuan Pendidikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Pontianak
1	01	01. 60	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Segedong
1	01	01. 61	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Mempawah Hilir
1	01	01. 62	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Mempawah Hilir
1	01	01. 63	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Toho
1	01	01. 64	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Pinyuh
1	01	01. 65	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Kunyit
1	01	01. 66	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Anjungan
1	01	01. 67	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Siantan
1	01	01. 68	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Mempawah Hilir
1	01	01. 69	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sadaniang
1	01	01. 70	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sungai Kunyit
1	01	01. 71	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Mempawah Timur
1	01	01. 72	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Singkawang
1	01	01. 73	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Singkawang
1	01	01. 74	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Singkawang
1	01	01. 75	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Singkawang
1	01	01. 76	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 5 Singkawang
1	01	01. 77	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 6 Singkawang
1	01	01. 78	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 7 Singkawang
1	01	01. 79	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 8 Singkawang
1	01	01. 80	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 9 Singkawang
1	01	01. 81	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 10 Singkawang
1	01	01. 82	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Singkawang
1	01	01. 83	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Singkawang
1	01	01. 84	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 3 Singkawang
1	01	01. 85	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 5 Singkawang
1	01	01. 86	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri IV SPP-SPMA Singkawang
1	01	01. 87	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sambas
1	01	01. 88	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sambas
1	01	01. 89	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Galing
1	01	01. 90	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Galing
1	01	01. 91	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Jawai
1	01	01. 92	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Jawai Selatan
1	01	01. 93	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Paloh
1	01	01. 94	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Paloh
1	01	01. 95	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tebas
1	01	01. 96	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Tebas
1	01	01. 97	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Tebas
1	01	01. 98	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pemangkat
1	01	01. 99	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Pemangkat
1	01	01. 100	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sejangkung
1	01	01. 101	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Selakau
1	01	01. 102	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Selakau
1	01	01. 103	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Semparuk

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	01	01. 104	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Subah
1	01	01. 105	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Subah
1	01	01. 106	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tekarang
1	01	01. 107	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Teluk Keramat
1	01	01. 108	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Teluk Keramat
1	01	01. 109	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Teluk Keramat
1	01	01. 110	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Teluk Keramat
1	01	01. 111	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sebawi
1	01	01. 112	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sajad
1	01	01. 113	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Salatiga
1	01	01. 114	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sambas
1	01	01. 115	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Sambas
1	01	01. 116	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pemangkat
1	01	01. 117	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Pemangkat
1	01	01. 118	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Paloh
1	01	01. 119	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sajingan Besar
1	01	01. 120	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Teluk Keramat
1	01	01. 121	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Teluk Keramat
1	01	01. 122	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Jawai
1	01	01. 123	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Jawai Selatan
1	01	01. 124	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Selakau Timur
1	01	01. 125	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tangaran
1	01	01. 126	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Semparuk
1	01	01. 127	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tebas
1	01	01. 128	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sejangkung
1	01	01. 129	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Subah
1	01	01. 130	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tekarang
1	01	01. 131	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bengkayang
1	01	01. 132	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Bengkayang
1	01	01. 133	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Bengkayang
1	01	01. 134	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Seluas
1	01	01. 135	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Seluas
1	01	01. 136	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sangggau Ledo
1	01	01. 137	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Samalantan
1	01	01. 138	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Samalantan
1	01	01. 139	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Samalantan
1	01	01. 140	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ledo
1	01	01. 141	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Ledo
1	01	01. 142	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Jagoi Babang
1	01	01. 143	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Capkala
1	01	01. 144	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Teriak
1	01	01. 145	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Teriak
1	01	01. 146	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Betung
1	01	01. 147	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Lumar
1	01	01. 148	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Siding
1	01	01. 149	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Siding
1	01	01. 150	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Suti Semarang
1	01	01. 151	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Monterado
1	01	01. 152	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tujuh Belas
1	01	01. 153	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Lembah Bawang
1	01	01. 154	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Raya
1	01	01. 155	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan
1	01	01. 156	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Bengkayang
1	01	01. 157	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Bengkayang
1	01	01. 158	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sanggau Ledo
1	01	01. 159	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Monterado
1	01	01. 160	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sungai Raya

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	01	01. 161	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Jagoi Babang
1	01	01. 162	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Samalantan
1	01	01. 163	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan
1	01	01. 164	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ngabang
1	01	01. 165	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Ngabang
1	01	01. 166	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sengah Temila
1	01	01. 167	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sengah Temila
1	01	01. 168	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Sengah Temila
1	01	01. 169	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Sengah Temila
1	01	01. 170	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Mandor
1	01	01. 171	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Mandor
1	01	01. 172	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Mandor
1	01	01. 173	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Menyauke
1	01	01. 174	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Menyauke
1	01	01. 175	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Mempawah Hulu
1	01	01. 176	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Menjalin
1	01	01. 177	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sebangki
1	01	01. 178	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kuala Behe
1	01	01. 179	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Kuala Behe
1	01	01. 180	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sompak
1	01	01. 181	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Jelimpo
1	01	01. 182	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Banyuke Hulu
1	01	01. 183	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Meranti
1	01	01. 184	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Air Besar
1	01	01. 185	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Ngabang
1	01	01. 186	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sengah Temila
1	01	01. 187	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Mandor
1	01	01. 188	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Mempawah Hulu
1	01	01. 189	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sanggau
1	01	01. 190	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sanggau
1	01	01. 191	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Sanggau
1	01	01. 192	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Noyan
1	01	01. 193	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Jangkang
1	01	01. 194	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Meliau
1	01	01. 195	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Meliau
1	01	01. 196	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kambayan
1	01	01. 197	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Balai
1	01	01. 198	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sekayam
1	01	01. 199	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sekayam
1	01	01. 200	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Toba
1	01	01. 201	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Beduai
1	01	01. 202	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bonti
1	01	01. 203	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tayan Hulu
1	01	01. 204	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tayan Hilir
1	01	01. 205	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sanggau
1	01	01. 206	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Entikong
1	01	01. 207	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Mukok
1	01	01. 208	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Parindu
1	01	01. 209	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Balai
1	01	01. 210	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sekadau
1	01	01. 211	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sekadau
1	01	01. 212	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Sekadau Hilir
1	01	01. 213	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Sekadau
1	01	01. 214	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sekadau Hulu
1	01	01. 215	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sekadau Hulu
1	01	01. 216	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Sekadau Hulu
1	01	01. 217	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Belitang

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	01	01. 218	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Belitang Hilir
1	01	01. 219	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Belitang Hulu
1	01	01. 220	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Belitang Hulu
1	01	01. 221	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Nanga Mahab
1	01	01. 222	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Nanga Mahab
1	01	01. 223	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Nanga Taman
1	01	01. 224	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Nanga Taman
1	01	01. 225	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sekadau
1	01	01. 226	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Nanga Taman
1	01	01. 227	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sintang
1	01	01. 228	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sintang
1	01	01. 229	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Sintang
1	01	01. 230	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Sintang
1	01	01. 231	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sepauk
1	01	01. 232	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sepauk
1	01	01. 233	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kelam Permai
1	01	01. 234	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ketungau Hulu
1	01	01. 235	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ketungau Tengah
1	01	01. 236	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Ketungau Tengah
1	01	01. 237	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ketungau Hilir
1	01	01. 238	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Tebelian
1	01	01. 239	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Serawai
1	01	01. 240	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ambalau
1	01	01. 241	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Binjai Hulu
1	01	01. 242	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kayan Hilir
1	01	01. 243	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kayan Hulu
1	01	01. 244	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tempunak
1	01	01. 245	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Tempunak
1	01	01. 246	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Tempunak
1	01	01. 247	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Dedai
1	01	01. 248	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Dedai
1	01	01. 249	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sintang
1	01	01. 250	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kelam Permai
1	01	01. 251	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Ketungau Tengah
1	01	01. 252	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sepauk
1	01	01. 253	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Serawai
1	01	01. 254	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kayan Hilir
1	01	01. 255	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Dedai
1	01	01. 256	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Nanga Pinoh
1	01	01. 257	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Nanga Pinoh
1	01	01. 258	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tanah Pinoh
1	01	01. 259	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tanah Pinoh Barat
1	01	01. 260	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sokan
1	01	01. 261	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sayan
1	01	01. 262	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Belimbing
1	01	01. 263	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Belimbing
1	01	01. 264	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Menukung
1	01	01. 265	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pinoh Selatan
1	01	01. 266	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pinoh Utara
1	01	01. 267	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Belimbing Hulu
1	01	01. 268	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Nanga Pinoh
1	01	01. 269	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tanah Pinoh
1	01	01. 270	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Belimbing
1	01	01. 271	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sayan
1	01	01. 272	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Ella Hilir
1	01	01. 273	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sokan
1	01	01. 274	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Belimbing Hulu

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	01	01. 275	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Putussibau
1	01	01. 276	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Putussibau
1	01	01. 277	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bunut Hulu
1	01	01. 278	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Bunut Hulu
1	01	01. 279	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Embaloh Hulu
1	01	01. 280	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Embaloh Hilir
1	01	01. 281	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pengkadan
1	01	01. 282	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Mentebah
1	01	01. 283	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Boyan Tanjung
1	01	01. 284	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Silat Hulu
1	01	01. 285	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kalis
1	01	01. 286	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Badau
1	01	01. 287	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bunut Hilir
1	01	01. 288	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Jongkong
1	01	01. 289	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Jongkong
1	01	01. 290	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Hulu Gurung
1	01	01. 291	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Seberuang
1	01	01. 292	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Selimbau
1	01	01. 293	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Selimbau
1	01	01. 294	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Semitau
1	01	01. 295	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Selat Hilir
1	01	01. 296	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Batang Lumpar
1	01	01. 297	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Bika
1	01	01. 298	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Putussibau
1	01	01. 299	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Putussibau
1	01	01. 300	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri Hulu Gurung
1	01	01. 301	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Ketapang
1	01	01. 302	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Ketapang
1	01	01. 303	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Ketapang
1	01	01. 304	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Ketapang
1	01	01. 305	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Kendawangan
1	01	01. 306	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Kendawangan
1	01	01. 307	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Tumbang Titi
1	01	01. 308	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Matan Hilir Selatan
1	01	01. 309	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Nanga Tayap
1	01	01. 310	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Nanga Tayap
1	01	01. 311	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Marau
1	01	01. 312	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Manis Mata
1	01	01. 313	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Laur
1	01	01. 314	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Jelai Hulu
1	01	01. 315	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Matan Hilir Utara
1	01	01. 316	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sandai
1	01	01. 317	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sungai Melayu Rayak
1	01	01. 318	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Singkup
1	01	01. 319	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Hulu Sungai
1	01	01. 320	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Muara Pawan
1	01	01. 321	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Simpang Dua
1	01	01. 322	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Hulu
1	01	01. 323	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Ketapang
1	01	01. 324	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 2 Ketapang
1	01	01. 325	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Muara Pawan
1	01	01. 326	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kendawangan
1	01	01. 327	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pemahan
1	01	01. 328	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Hulu
1	01	01. 329	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sandai
1	01	01. 330	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Manis Mata
1	01	01. 331	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tumbang Titi

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	01	01. 332	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Air Upas
1	01	01. 333	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Nanga Tayap
1	01	01. 334	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Jelai Hulu
1	01	01. 335	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Marau
1	01	01. 336	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sungai Melayu Rayak
1	01	01. 337	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Sukadana
1	01	01. 338	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Sukadana
1	01	01. 339	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Sukadana
1	01	01. 340	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Simpang Hilir
1	01	01. 341	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Simpang Hilir
1	01	01. 342	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 3 Simpang Hilir
1	01	01. 343	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 4 Simpang hilir
1	01	01. 344	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Teluk Batang
1	01	01. 345	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Teluk Batang
1	01	01. 346	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Seponti
1	01	01. 347	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Seponti
1	01	01. 348	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pulau Maya
1	01	01. 349	UPT Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Pulau Maya
1	01	01. 350	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Sukadana
1	01	01. 351	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Teluk Batang
1	01	01. 352	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Simpang Hilir
1	01	01. 353	UPT Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Pulau Maya
1	02		Kesehatan
1	02	01.	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar
1	02	01. 01	Dinas Kesehatan Prov. Kalbar
1	02	01. 03	UPT Pelatihan Kesehatan Prov. Kalbar
1	02	01. 04	UPT Laboratorium Kesehatan Prov. Kalbar
1	02	01. 07	UPT Pelayanan Kesehatan Paru Prov.Kalbar
1	02	01. 08	UPT Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat Prov.Kalbar
1	02	02.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak
1	02	02. 01	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak
1	02	03.	Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalbar
1	02	03. 01	Rumah Sakit Jiwa Prov. Kalbar
1	02	04.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Prov. Kalbar
1	02	04. 01	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Prov. Kalbar
1	03		Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	03	01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
1	03	01. 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
1	03	01. 03	UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I Prov. Kalbar
1	03	01. 04	UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Prov. Kalbar
1	03	01. 05	UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III Prov. Kalbar
1	03	01. 06	UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah IV Prov. Kalbar
1	03	01. 07	UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah V Prov. Kalbar
1	03	01. 08	UPT Laboratorium Bahan Konstruksi Prov.Kalbar

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04 01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar
1	04 01. 01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar
1	03 01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
1	03 01. 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar
1	05	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
1	05 01.	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar
1	05 01. 01	Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar
1	05 02.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar
1	05 02. 01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar
1	06	Sosial
1	06 01.	Dinas Sosial Prov. Kalimantan Barat
1	06 01. 01	Dinas Sosial Prov. Kalimantan Barat
1	06 01. 03	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mustika Dharma Prov.Kalbar
1	06 01. 04	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Prov.Kalbar
1	06 01. 05	UPT Panti Sosial Anak Prov.Kalbar
2		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
2	01	Tenaga Kerja
2	01 01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar
2	01 01. 01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar
2	01 01. 04	UPT. Latihan Kerja Industri Prov. Kalbar
2	01 01. 05	UPT. Latihan Kerja Industri Entikong Prov. Kalbar
2	01 01. 07	UPT. Pengawasan Ketenaga Kerjaan Prov. Kalbar
2	01 01. 08	UPT. Laboratorium Kesehatan Kerja Prov. Kalbar
2	01 01. 09	UPT. Pengawasan Ketenaga Kerjaan Wilayah II Prov. Kalbar
2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	02 01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar
2	02 01. 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar
2	03	Pangan
2	03 01.	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar
2	03 01. 01	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar
2	03 01. 04	UPT Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak Prov. Kalbar
2	03 01. 05	UPT Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar
2	05	Lingkungan Hidup
1	04 01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar
1	04 01. 01	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar

✓?

Sdh ada
2x

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2	06	Administrasi Kependudukan dan catatan sipil
2	06	01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
2	06	01. 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
2	07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	07	01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar
2	07	01. 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar
2	08	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	06	01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
2	06	01. 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
2	09	Perhubungan
2	09	01. Dinas Perhubungan Prov. Kalbar
2	09	01. 01 Dinas Perhubungan Prov. Kalbar
2	10	Komunikasi dan Informatika
2	10	01. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar
2	10	01. 01 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar
2	11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	11	01. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar
2	11	01. 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar
2	11	01. 03 UPT. Pelatihan Koperasi Prov. Kalbar
2	12	Penanaman Modal
2	12	01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar
2	12	01. 01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar
2	13	Kepemudaan dan Olah Raga
2	13	01. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar
2	13	01. 01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar
2	14	Statistik
2	10	01. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar
2	10	01. 01 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar
2	15	Persandian
2	10	01. Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar
2	10	01. 01 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2	16		Kebudayaan
1	01	01.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar
1	01	01. 01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar
1	01	01. 03	UPT. Taman Budaya Prov. Kalbar
1	01	01. 04	UPT. Museum Prov. Kalbar
2	17		Perpustakaan
2	17	01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar
2	17	01. 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar
2	18		Kearsipan
2	17	01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar
2	17	01. 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar
3			URUSAN PILIHAN
3	01		Kelautan dan Perikanan
3	01	01.	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar
3	01	01. 01	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar
3	01	01. 05	UPT Pelabuhan Perikanan Prov. Kalbar
3	01	01. 06	UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Prov. Kalbar
3	01	01. 07	UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Prov. Kalbar
3	02		Pariwisata
2	13	01.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar
2	13	01. 01	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar
3	03		Pertanian
3	03	01.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar
3	03	01. 01	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar
3	03	01. 08	UPT Pembenuhan Tanaman Pangan Prov. Kalbar
3	03	01. 09	UPT Balai Benih Induk Hortikultura Prov. Kalbar
3	03	01. 10	UPT Diklat Pertanian Prov. Kalbar
3	03	01. 11	UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar
3	03	01. 12	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Prov. Kalbar
3	03	02.	Dinas Perkebunan Prov. Kalbar
3	03	02. 01	Dinas Perkebunan Prov. Kalbar
3	03	02. 03	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Prov. Kalbar
2	03	01.	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar
2	03	01. 01	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar
2	03	01. 04	UPT Pembibitan Ternak dan Pakan Ternak Prov. Kalbar
2	03	01. 05	UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesmavet dan Klinik Hewan Prov. Kalbar

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3	04		Kehutanan
3	04	01.	Dinas Kehutanan Prov. Kalbar
3	04	01. 01	Dinas Kehutanan Prov. Kalbar
3	04	01. 04	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sambas Prov. Kalbar
3	04	01. 05	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Bengkayang Prov. Kalbar
3	04	01. 06	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah Prov. Kalbar
3	04	01. 07	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Landak Prov. Kalbar
3	04	01. 08	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kubu Raya Prov. Kalbar
3	04	01. 09	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Melawi Prov. Kalbar
3	04	01. 10	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong Prov. Kalbar
3	04	01. 11	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Utara Prov. Kalbar
3	04	01. 12	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Ketapang Selatan Prov. Kalbar
3	04	01. 13	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sekadau Prov. Kalbar
3	04	01. 14	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Barat Prov. Kalbar
3	04	01. 15	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sanggau Timur Prov. Kalbar
3	04	01. 16	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Timur Prov. Kalbar
3	04	01. 17	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Sintang Utara Prov. Kalbar
3	04	01. 18	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Utara Prov. Kalbar
3	04	01. 19	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Timur Prov. Kalbar
3	04	01. 20	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kapuas Hulu Selatan Prov. Kalbar
3	04	01. 21	UPT Pengelolaan Kawasan Ekosistem Lahan Basah Prov. Kalbar
3	04	01. 22	UPT Taman Hutan Raya Pandan Puloh Prov. Kalbar
3	04	01. 23	UPT Perbenihan Tanaman Hutan Prov. Kalbar
3	05		Energi dan Sumberdaya Mineral
3	05	01.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar
3	05	01. 01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar
3	06		Perdagangan
3	06	01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar
3	06	01. 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar
3	06	01. 04	UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Prov. Kalbar
3	06	01. 05	UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan Prov. Kalbar
3	07		Perindustrian
3	06	01.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar
3	06	01. 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar
3	06	01. 05	UPT Industri Pangan Olahan dan Kemasan Prov. Kalbar
3	08		Transmigrasi
2	01	01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar
2	01	01. 01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar
4			URUSAN PENUNJANG
4	01		Perencanaan
4	01	01.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kalbar
4	01	01. 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kalbar

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4	02	Keuangan
4	02	01. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4	02	01. 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar
4	02	01. 02 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah I Prov. Kalbar
4	02	01. 03 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Pontianak Wilayah II Prov. Kalbar
4	02	01. 04 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Singkawang Prov. Kalbar
4	02	01. 05 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Mempawah Prov. Kalbar
4	02	01. 06 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sambas Prov. Kalbar
4	02	01. 07 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sanggau Prov. Kalbar
4	02	01. 08 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sintang Prov. Kalbar
4	02	01. 09 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Putussibau Prov. Kalbar
4	02	01. 10 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ketapang Prov. Kalbar
4	02	01. 11 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Ngabang Prov. Kalbar
4	02	01. 12 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Bengkayang Prov. Kalbar
4	02	01. 13 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kubu Raya Prov. Kalbar
4	02	01. 14 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Sekadau Prov. Kalbar
4	02	01. 15 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Melawi Prov. Kalbar
4	02	01. 16 UPT Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kayong Utara Prov. Kalbar
4	02	01. 17 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov. Kalbar/PPKD
4	03	Kepegawaian
4	03	01. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar
4	03	01. 01 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar
4	04	Pendidikan dan Pelatihan
4	04	01. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalbar
4	04	01. 01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalbar
4	05	Penelitian dan Pengembangan
4	05	01. Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalbar
4	05	01. 01 Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalbar
4	06	Pengawasan
4	06	01. Inspektorat Provinsi Kalbar
4	06	01. 01 Inspektorat Provinsi Kalbar
4	10	Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan
4	10	01. Badan Penghubung Prov. Kalbar di Jakarta
4	10	01. 01 Badan Penghubung Prov. Kalbar di Jakarta
4	11	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4	11	01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar
4	11	01. 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5			URUSAN PENDUKUNG
5	01		Sekretariat Daerah Prov. Kalbar
5	01	01.	Sekretariat Daerah Prov. Kalbar
5	01	01. 00	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5	01	01. 01	Sekretariat Daerah Prov. Kalbar
5	01	01. 02	Biro Umum Setda Prov. Kalbar
5	01	01. 03	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Prov. Kalbar
5	01	01. 04	Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar
5	01	01. 05	Biro Hukum Setda Prov. Kalbar
5	01	01. 06	Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar
5	01	01. 07	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalbar
5	01	01. 08	Biro Perckonomian Setda Prov. Kalbar
5	01	01. 09	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Kalbar
5	01	01. 10	Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar
5	02		Sekretariat DPRD
5	02	01.	Sekretariat DPRD Prov. Kalbar
5	02	01. 00	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Kalbar
5	02	01. 01	Sekretariat DPRD Prov. Kalbar

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT/

SUTARMIDJI

B. KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
XX					URUSAN PEMERINTAHAN	
XX	XX				SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
XX	XX	x.xx.xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
XX	XX	x.xx.xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Untuk menganggarkan biaya pengiriman surat seperti prangko, ongkos kirim
XX	XX	x.xx.xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Untuk menganggarkan pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM, internet untuk kantor
XX	XX	x.xx.xx	01	03	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Untuk menganggarkan jasa asuransi barang daerah yang dikeluarkan berdasarkan Pergub yang berlaku
XX	XX	x.xx.xx	01	04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Untuk menganggarkan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional dan pajak kendaraan (STNK, Asuransi PKB) dan KIR kendaraan.
XX	XX	x.xx.xx	01	05	Penyediaan jasa Administrasi keuangan	Untuk menganggarkan biaya transaksi keuangan jasa transfer, jasa giro, adm.cek,bukan untuk membayar pelaksana administrasi keuangan bendahara dan sejenisnya
XX	XX	x.xx.xx	01	06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Untuk menganggarkan biaya kebersihan kantor
XX	XX	x.xx.xx	01	07	Penyediaan alat tulis kantor	Untuk menganggarkan pengadaan Alat tulis kantor untuk kebutuhan rutin.
XX	XX	x.xx.xx	01	08	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Untuk menganggarkan pengadaan barang cetakan (Amplop surat, Kop Surat, Blanko tertentu, jilid buku, dan sejenisnya) dan penggandaan (fotokopi)
XX	XX	x.xx.xx	01	09	Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Untuk menganggarkan pengadaan alat listrik (Bola lampu, trafo, baterai, stacker, stop kontak, pitting, dan sejenisnya)
XX	XX	x.xx.xx	01	10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Untuk menganggarkan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak bersifat modal tidak memerlukan Pemeliharaan
XX	XX	x.xx.xx	01	11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga	Untuk menganggarkan pengadaan peralatan rumah tangga yang tidak bersifat modal,
XX	XX	x.xx.xx	01	12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Untuk menganggarkan pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
XX	XX	x.xx.xx	01	13	Penyediaan makanan dan minuman	Untuk menganggarkan pengadaan makanan dan minuman (Rapat, Tamu)

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN	
xx	xx	x.xx.xx	01	14	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah	Untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam memperlancar koordinasi dan konsultasi yang tidak termasuk dalam kegiatan tertentu serta untuk menghadiri undangan Pemerintah
xx	xx	x.xx.xx	01	15	Penyediaan Jasa Keamanan lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Untuk menganggarkan biaya pemeliharaan keamanan seperti jasa satpam, jaga malam dan sejenisnya
xx	xx	x.xx.xx	01	16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Untuk menganggarkan Honor PPK, PPK Pembantu, Pembantu PPK, Pembantu PPK Pembantu, Bendahara, Bendahara pembantu, Pembantu Bendahara, pengurus barang, penyimpan barang
xx	xx	x.xx.xx	01	17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Untuk menganggarkan Pemasangan spanduk pada peringatan hari hari besar, ucapan selamat, Jasa Publikasi dan dokumentasi
xx	xx	x.xx.xx	01	18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Untuk menganggarkan kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Arsip
xx	xx	x.xx.xx	01	19	Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan	Untuk menganggarkan jasa untuk kebersihan rumah Jabatan Kepala Daerah , Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD
xx	xx	x.xx.xx	01	20	Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung Kantor / Bangunan Khusus	Untuk menganggarkan jasa sewa rumah / Gedung kantor / Bangunan Khusus
xx	xx	x.xx.xx	01	21	Pemindahan Sarana dan Prasarana Kantor	Untuk menganggarkan biaya- biaya pindah kantor
xx	xx	x.xx.xx	01	22	Penyediaan Informasi SKPD Melalui Media Cetak dan Elektronik	Untuk menganggarkan Pengelolaan Website SKPD dan Penyusunan Buletin SKPD dan sejenisnya
xx	xx	x.xx.xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana	
xx	xx	x.xx.xx	02	01	Pembangunan Rumah Jabatan	Untuk menganggarkan Pembangunan Rumah jabatan.
xx	xx	x.xx.xx	02	02	Pembangunan gedung kantor	Untuk menganggarkan pengadaan gedung kantor tempat pelaksanaan aktifitas kantor
xx	xx	x.xx.xx	02	03	Pembangunan Gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus	Untuk menganggarkan pembangunan Rumah Genset ,tugu , monumen, Turap dan sejenisnya dalam lingkungan Kantor
xx	xx	x.xx.xx	02	04	Pengadaan tanah / lahan	Untuk menganggarkan pengadaan tanah, lahan,
xx	xx	x.xx.xx	02	05	Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	Untuk menganggarkan pengadaan kendaraan jabatan, Dinas/Operasional
xx	xx	x.xx.xx	02	06	Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan	Untuk menganggarkan pengadaan perlengkapan / peralatan rumah jabatan
xx	xx	x.xx.xx	02	07	Pengadaan AC / Kipas Angin	Untuk menganggarkan Pengadaan AC, Kipas Angin

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
xx	xx	x.xx.xx	02	08	Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor	Untuk menganggarkan Pengadaan Komputer, Laptop, Printer, Filling Kabinet, Brankas, Mesin Tik, Mesin Absensi dan sejenisnya
xx	xx	x.xx.xx	02	09	Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga	Untuk menganggarkan pengadaan Kulkas, Tabung Pemadam Api, dispenser dan sejenisnya
xx	xx	x.xx.xx	02	10	Pengadaan / Peningkatan Instalasi listrik / telepon	Untuk menganggarkan pengadaan/peningkatan instalasi/ daya listrik, saluran telepon dan sejenisnya
xx	xx	x.xx.xx	02	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Untuk menganggarkan pengadaan Sound Sistem, HT, Faximile, Pemancar, Jaringan dan sejenisnya)
xx	xx	x.xx.xx	02	12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Untuk menganggarkan pengadaan software, hardware dan jaringan komputer, dengan menempatkannya pada masing masing rekening belanja berkenaan
xx	xx	x.xx.xx	02	13	Pengadaan sarana/prasarana pendukung gedung kantor	Untuk menganggarkan pengadaan Kanopi, Teralis, Gordin, Penangkal Petir dan sejenisnya
xx	xx	x.xx.xx	02	14	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Untuk menganggarkan pemeliharaan rumah jabatan , yang sifatnya tidak menambah aset
xx	xx	x.xx.xx	02	15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Untuk menganggarkan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang sifatnya tidak menambah aset
xx	xx	x.xx.xx	02	16	Pemeliharaan rutin / berkala gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus	Untuk menganggarkan Pemeliharaan Rumah Genset, tugu, monumen, dan sejenisnya
xx	xx	x.xx.xx	02	17	Pemeliharaan taman / halaman kantor / halaman rumah jabatan	Untuk menganggarkan pemeliharaan taman, perawatan halaman kantor, pengurukan tanah untuk taman dan lingkungan kantor, halaman rumah jabatan KDH , WKDH, dan Pimpinan DPRD yang sifatnya tidak menambah aset
xx	xx	x.xx.xx	02	18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional	Untuk menganggarkan pemeliharaan mobil jabatan, Dinas/Operasional yang sifatnya tidak menambah aset
xx	xx	x.xx.xx	02	19	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan / peralatan rumah jabatan	Untuk menganggarkan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumah jabatan yang sifatnya tidak menambah aset
xx	xx	x.xx.xx	02	20	Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin	Untuk menganggarkan Pemeliharaan rutin/berkala AC, Kipas Angin
xx	xx	x.xx.xx	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor	Untuk menganggarkan Pemeliharaan rutin/berkala Komputer, laptop, printer filling kabinet, brankas,mesin tik , mesin absensi dan sejenisnya dan sejenisnya

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN		PENJELASAN
xx	xx	x.xx.xx	02	22	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Studio dan Komunikasi	Untuk menganggarkan Pemeliharaan Sound sisytam, pemancar, jaringan dan sejenisnya
xx	xx	x.xx.xx	02	23	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Sistem informasi	Untuk menganggarkan Pemeliharaan Server, Jaringan, Pemancar yang sifatnya tidak menambah aset
xx	xx	x.xx.xx	02	24	Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Untuk menganggarkan pemeliharaan, Kanopi, Teralis, Penangkal Petir dan sejenisnya yang sifatnya tidak menambah aset
xx	xx	x.xx.xx	02	25	Pengembangan Sistem Informasi	Untuk menganggarkan Pengembangan Sistem Informasi yang sudah dapat diaplikasikan, seperti penambahan modul baru, maupun peningkatan kualitas aplikasi
xx	xx	x.xx.xx	02	26	Pembangunan rumah dinas	Untuk Menganggarkan Pembangunan Rumah Dinas
xx	xx	x.xx.xx	02	27	Pembangunan mess / asrama	Untuk Menganggarkan Pembangunan, Mess, Asrama
xx	xx	x.xx.xx	02	28	Pembangunan Gedung Pertemuan / Aula	Untuk Menganggarkan Pembangunan gedung pertemuan / aula yang berada dalam lingkungan kantor
xx	xx	x.xx.xx	02	29	Pembangunan Gedung Tempat Ibadah	Untuk Menganggarkan Pembangunan mesjid, musholla, kapel dan sejenisnya yang berada dalam lingkungan Kantor
xx	xx	x.xx.xx	02	30	Pembangunan Gudang	Untuk Menganggarkan Pembangunan Gudang yang berada dalam lingkungan Kantor / Rumah Jabatan KDH , WKDH dan Pimpinan DPRD
xx	xx	x.xx.xx	02	31	Pembangunan Pos Penjaga Keamanan Kantor / Rumah Jabatan	Untuk Menganggarkan Pembangunan Pos Penjaga Keamanan kantor / Rumah Jabatan KDH , WKDH, Sekda dan Pimpinan DPRD
xx	xx	x.xx.xx	02	32	Pembangunan Garasi / Tempat Parkir Kendaraan	Untuk Menganggarkan Pembangunan Garasi atau Tempat Parkir kendaraan dilingkungan kantor / Rumah Jabatan KDH , WKDH, Sekda dan Pimpinan DPRD
xx	xx	x.xx.xx	02	33	Pembangunan Pagar	Untuk Menganggarkan Pembangunan Pagar kantor / Rumah Jabatan KDH , WKDH dan Pimpinan DPRD
xx	xx	x.xx.xx	02	34	Pembangunan Plank Nama Kantor	Untuk Menganggarkan Pembangunan Plank nama kantor
xx	xx	x.xx.xx	02	35	Pembangunan Pintu Gerbang	Untuk Menganggarkan Pembangunan Pintu Gerbang kantor / Rumah Jabatan KDH , WKDH dan Pimpinan DPRD
xx	xx	x.xx.xx	02	36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan kantor / Rumah Jabatan	Untuk Menganggarkan Pembangunan jalan/ jembatan lingkungan kantor / Rumah Jabatan

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
xx	xx	x.xx.xx	02	37	Pembangunan Saluran Air	Untuk Menganggarkan Pembangunan saluran air / parit untuk lingkungan kantor / Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Pimpinan DPRD
xx	xx	x.xx.xx	02	38	Pengadaan Jaringan Air	Untuk Menganggarkan Pemasangan jaringan air seperti pengadaan Piva dan kran air yang terdapat pada lingkungan kantor dan Rumah Jabatan
xx	xx	x.xx.xx	02	39	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus	Untuk Menganggarkan Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung khusus / bangunan khusus / konstruksi khusus
xx	xx	x.xx.xx	02	40	Pengadaan Sarana / Prasarana Olahraga	Untuk Menganggarkan Pembangunan Sarana / Prasarana Olahraga yang berada dalam lingkungan Kantor termasuk pengadaan peralatan dan perlengkapannya
xx	xx	x.xx.xx	02	41	Pengadaan Bak Air / Menara Air	Untuk Menganggarkan Pengadaan tempat penampungan air dan sarana prasarana pendukungnya seperti menara air, tangki fiber, jaringan air dan sejenisnya untuk lingkungan kantor dan Rumah Jabatan KDH, WKDH dan Pimpinan DPRD
xx	xx	x.xx.xx	02	42	Pengadaan Mebelair	Untuk menganggarkan Pengadaan mebelair
xx	xx	x.xx.xx	02	43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Untuk menganggarkan Pengadaan Mesin Pompa Air
xx	xx	x.xx.xx	02	44	Pengadaan Generator	Untuk menganggarkan Pengadaan generator
xx	xx	x.xx.xx	02	45	Pengadaan taman	Untuk menganggarkan Pengadaan Taman Kantor / rumah Jabatan
xx	xx	x.xx.xx	02	46	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan Rumah Dinas yang sifatnya tidak menambah aset (dengan persetujuan Sekretaris Daerah)
xx	xx	x.xx.xx	02	47	Pemeliharaan rutin/berkala mess / asrama	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan, Mess, Asrama yang sifatnya tidak menambah aset
xx	xx	x.xx.xx	02	48	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Pertemuan / Aula	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan gedung pertemuan / aula yang berada dalam lingkungan kantor yang sifatnya tidak menambah aset
xx	xx	x.xx.xx	02	49	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Tempat Ibadah	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan mesjid, musholla, kapel dan sejenisnya yang berada dalam lingkungan Kantor yang sifatnya tidak menambah aset
xx	xx	x.xx.xx	02	50	Pemeliharaan rutin/berkala Gudang	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan Gudang yang berada dalam lingkungan Kantor yang sifatnya tidak menambah aset

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
xx	xx	x.xx.xx	02	51	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan Sarana / Prasarana Olahraga yang berada dalam lingkungan Kantor yang sifatnya tidak menambah aset
xx	xx	x.xx.xx	02	52	Pemeliharaan rutin/berkala Pos Penjaga Keamanan kantor / Rumah Jabatan	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan Pos Penjaga Keamanan kantor / Rumah Jabatan KDH , WKDH dan Pimpinan DPRD yang sifatnya tidak menambah aset
xx	xx	x.xx.xx	02	53	Pemeliharaan rutin/berkala Garasi / Tempat Parkir kendaraan	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan Garasi atau Tempat Parkir kendaraan di lingkungan kantor / Rumah Jabatan KDH , WKDH, Sekda dan Pimpinan DPRD yang sifatnya tidak menambah aset
xx	xx	x.xx.xx	02	54	Pemeliharaan rutin/berkala Pagar	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan Pagar kantor / Rumah Jabatan KDH , WKDH dan Pimpinan DPRD yang sifatnya tidak menambah aset
xx	xx	x.xx.xx	02	55	Pemeliharaan rutin/berkala Plank Nama Kantor	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan Plank nama kantor yang sifatnya tidak menambah aset
xx	xx	x.xx.xx	02	56	Pemeliharaan rutin/berkala Pintu Gerbang	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan Pintu Gerbang kantor / Rumah Jabatan KDH , WKDH, Sekda dan Pimpinan DPRD
xx	xx	x.xx.xx	02	57	Pemeliharaan Jalan / Jembatan Lingkungan kantor / Rumah Jabatan	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan jalan / jembatan lingkungan kantor / Rumah Jabatan KDH , WKDH dan Pimpinan DPRD
xx	xx	x.xx.xx	02	58	Pemeliharaan rutin/berkala Bak air / Menara Air	Untuk menganggarkan pemeliharaan bak air / menara air untuk lingkungan kantor
xx	xx	x.xx.xx	02	59	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Air	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan jaringan air seperti pengantian Pipa dan kran air yang terdapat pada lingkungan kantor dan Rumah Jabatan
xx	xx	x.xx.xx	02	60	Pemeliharaan rutin/berkala Saluran Air	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan saluran air / parit pada lingkungan kantor / Rumah Jabatan KDH , WKDH, Sekda dan Pimpinan DPRD
xx	xx	x.xx.xx	02	61	Pemeliharaan instalasi Listrik / telepon	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan jaringan listrik/telepon seperti pengantian stopkontak , saklar dan sejenisnya
xx	xx	x.xx.xx	02	62	Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan Perlengkapan / Peralatan Gedung Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Seperti Perlengkapan / peralatan Laboratorium dan sejenisnya yang melekat pada gedung / bangunan khusus

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
xx	xx	x.xx.xx	02	63	Pemeliharaan lahan	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan lahan seperti penebasan
xx	xx	x.xx.xx	02	64	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan mebelair
xx	xx	x.xx.xx	02	65	Pemeliharaan rutin/berkala generator	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan generator seperti servis, penggantian saringan air, saringan udara, suku cadang dan pembelian bahan bakar dan pelumas
xx	xx	x.xx.xx	02	66	Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan mesin pompa air
xx	xx	x.xx.xx	02	67	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumah tangga	Untuk Menganggarkan Pemeliharaan yang sifatnya tidak menambah aset (Kulkas, dispenser dan sejenisnya)
xx	xx	x.xx.xx	02	68	Rehabilitasi / Peningkatan rumah jabatan	Rehab Berat yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas Rumah Jabatan.
xx	xx	x.xx.xx	02	69	Rehabilitasi / Peningkatan rumah dinas	Rehab Berat yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas Rumah Dinas (dengan persetujuan Sekretaris Daerah)
xx	xx	x.xx.xx	02	70	Rehabilitasi / Peningkatan mess / asrama	Rehab Berat yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas Mess, Asrama
xx	xx	x.xx.xx	02	71	Rehabilitasi / Peningkatan gedung kantor	Rehab Berat yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas gedung kantor
xx	xx	x.xx.xx	02	72	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Pertemuan / Aula	Rehab Berat yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas gedung pertemuan / aula yang berada dalam lingkungan kantor
xx	xx	x.xx.xx	02	73	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Rehabilitasi / Peningkatan mesjid, musholla, kapel dan sejenisnya yang berada dalam lingkungan Kantor
xx	xx	x.xx.xx	02	74	Rehabilitasi / Peningkatan Gudang	Rehab Berat yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas Gudang yang berada dalam lingkungan Kantor
xx	xx	x.xx.xx	02	75	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana / Prasarana Olahraga	Rehab Berat yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sarana / Prasarana Olahraga yang berada dalam lingkungan Kantor
xx	xx	x.xx.xx	02	76	Rehabilitasi / Peningkatan gedung khusus / bangunan khusus / Konstruksi khusus	Rehab Berat bangunan khusus yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Rumah Genset, tugu ,monumen, dan sejenisnya)

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
xx	xx	x.xx.xx	02	77	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Rehab sarana/prasarana pendukung gedung kantor yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Canopi Teralis, Penangkal Petir dan sejenisnya)
xx	xx	x.xx.xx	02	78	Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Rehab sarana & prasarana studio, komunikasi , yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (pemancar / Tower, jaringan dan sejenisnya)
xx	xx	x.xx.xx	02	79	Rehabilitasi / Peningkatan Pos Penjaga Keamanan kantor / Rumah Jabatan	Rehab Berat yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas Pos Penjaga Keamanan kantor / Rumah Jabatan KDH , WKDH dan Pimpinan DPRD
xx	xx	x.xx.xx	02	80	Rehabilitasi / Peningkatan Garasi / Tempat Parkir kendaraan	Rehab Berat yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas Garasi atau Tempat Parkir kendaraan dilingkungan kantor
xx	xx	x.xx.xx	02	81	Rehabilitasi / Peningkatan Pagar kantor	Rehab Berat yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas Pagar kantor
xx	xx	x.xx.xx	02	82	Rehabilitasi / Peningkatan Plank Nama Kantor	Rehab Berat yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas Plank nama kantor
xx	xx	x.xx.xx	02	83	Rehabilitasi / Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	Rehab Berat yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas Pintu Gerbang kantor
xx	xx	x.xx.xx	02	84	Rehabilitasi / Peningkatan Bak air / Menara Air / Jaringan Air	Rehab Berat yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas bak air / menara air untuk lingkungan kantor / Rumah Jabatan KDH , WKDH dan Pimpinan DPRD
xx	xx	x.xx.xx	02	85	Rehabilitasi / Peningkatan Saluran Air	Rehab Berat yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas saluran air / parit untuk lingkungan kantor / / Rumah Jabatan KDH , WKDH dan Pimpinan DPRD
xx	xx	x.xx.xx	02	86	Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan kantor / Rumah Jabatan	Rehab Berat yang sifatnya atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan/ jembatan lingkungan kantor / Rumah Jabatan KDH , WKDH dan Pimpinan DPRD
xx	xx	x.xx.xx	02	87	Pengadaan Sertifikat Tanah	Untuk Pengadaan dan Bea Balik Nama Sertifikasi Tanah
xx	xx	x.xx.xx	02	88	Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Khusus	

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
XX	XX	X.XX.XX	03	Program peningkatan disiplin aparatur	
XX	XX	X.XX.XX	03	01 Pengadaan pakaian dinas / kerja dan perlengkapannya	PDH Khaki, PDH Kemeja Putih dengan celana/rok hitam atau gelap, PDH Batik, PDH Khusus, PSH, PSL, PSR, PDL, PDU, Pakaian LINMAS, Pakaian KORPRI, Pakaian Olahraga
XX	XX	X.XX.XX	03	02 Pengadaan pakaian khusus dan perlengkapannya	Pakaian Satpam, Pakaian Adat, dll
XX	XX	X.XX.XX	03	03 Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	
XX	XX	X.XX.XX	04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	
XX	XX	X.XX.XX	04	01 Pemulangan pegawai yang pensiun	
XX	XX	X.XX.XX	04	02 Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas	
XX	XX	X.XX.XX	04	03 Pemulangan pegawai yang meninggal di luar daerah	
XX	XX	X.XX.XX	04	04 Pemandahan tugas PNS	
XX	XX	X.XX.XX	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
XX	XX	X.XX.XX	05	01 Pendidikan dan pelatihan	Untuk membiayai PNS yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan
XX	XX	X.XX.XX	05	02 Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Untuk membiayai PNS yang mengikuti sosialisasil Peraturan Perundangan-undangan, Bimtek Workshop dan sejenisnya .
XX	XX	X.XX.XX	05	03 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	
XX	XX	X.XX.XX	05	04 Pembinaan Jasmani dan Rohani	
XX	XX	X.XX.XX	05	05 Penyusunan Analisis Jabatan	
XX	XX	X.XX.XX	05	06 Penyusunan Penetapan Kinerja	
XX	XX	X.XX.XX	05	07 Penyusunan Standar Operasional Prosedur	
XX	XX	X.XX.XX	05	08 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Untuk Melaksanakan Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek untuk Internal SKPD
XX	XX	X.XX.XX	05	09 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Untuk Melaksanakan Kegiatan pemutahiran data pegawai, penyusunan SKP, kenaikan pangkat, berkala, pensiun dan sejenisnya
XX	XX	X.XX.XX	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
XX	XX	X.XX.XX	06	01 Penyusunan laporan keuangan	
XX	XX	X.XX.XX	06	02 Penyusunan LAKIP	
XX	XX	X.XX.XX	06	03 Penyusunan RENSTRA	
XX	XX	X.XX.XX	06	04 Penyusunan RENJA SKPD	
XX	XX	X.XX.XX	06	05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	
XX	XX	X.XX.XX	06	06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
XX	XX	X.XX.XX	06	07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	
XX	XX	X.XX.XX	06	08 Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi	
XX	XX	X.XX.XX	06	09 Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran	
XX	XX	X.XX.XX	06	10 Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
XX	XX	X.XX.XX	07	Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
xx	xx	x.xx.xx	07	01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	
1					URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	Kode rekening ini dipergunakan untuk program - kegiatan tertentu yang mendukung Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan SKPD tersebut.
1	01	1.01.01			Pendidikan	
1	01	1.01.01	15		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar	
1	01	1.01.01	15		Program.....	
1	01	1.01.01	15	01	Kegiatan.....	
1	01	1.01.01	15	02	dst.....	
1	01	1.01.01	15	03	dst.....	
1	01	1.01.01	16		Program.....	
1	01	1.01.01	16	01	Kegiatan.....	
1	01	1.01.01	16	02	dst.....	
1	01	1.01.01	16	03	dst.....	
1	01	1.01.01	xx		dst.....	
1	01	1.01.01	xx	xx	dst.....	
1	02				Kesehatan	
1	02	1.02.01			Dinas Kesehatan Prov. Kalbar	
1	02	1.02.01	15		Program.....	
1	02	1.02.01	15	01	Kegiatan.....	
1	02	1.02.01	15	02	dst.....	
1	02	1.02.01	15	03	dst.....	
1	02	1.02.01	16		Program.....	
1	02	1.02.01	16	01	Kegiatan.....	
1	02	1.02.01	16	02	dst.....	
1	02	1.02.01	16	03	dst.....	
1	02	1.02.01	xx		dst.....	
1	02	1.02.01	xx	xx	dst.....	
1	02	1.02.02			RSUD Dr. Soedarso Pontianak	
1	02	1.02.02	15		Program.....	
1	02	1.02.02	15	01	Kegiatan.....	
1	02	1.02.02	15	02	dst.....	
1	02	1.02.02	15	03	dst.....	
1	02	1.02.02	16		Program.....	
1	02	1.02.02	16	01	Kegiatan.....	
1	02	1.02.02	16	02	dst.....	
1	02	1.02.02	16	03	dst.....	
1	02	1.02.02	xx		dst.....	
1	02	1.02.02	xx	xx	dst.....	
1	02	1.02.03			Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalbar	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
1	02	1.02.03	15		Program.....	
1	02	1.02.03	15	01	Kegiatan.....	
1	02	1.02.03	15	02	dst.....	
1	02	1.02.03	15	03	dst.....	
1	02	1.02.03	16		Program.....	
1	02	1.02.03	16	01	Kegiatan.....	
1	02	1.02.03	16	02	dst.....	
1	02	1.02.03	16	03	dst.....	
1	02	1.02.03	xx		dst.....	
1	02	1.02.03	xx	xx	dst.....	
1	02	1.02.04			Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong	
1	02	1.02.04	15		Program.....	
1	02	1.02.04	15	01	Kegiatan.....	
1	02	1.02.04	15	02	dst.....	
1	02	1.02.04	15	03	dst.....	
1	02	1.02.04	16		Program.....	
1	02	1.02.04	16	01	Kegiatan.....	
1	02	1.02.04	16	02	dst.....	
1	02	1.02.04	16	03	dst.....	
1	02	1.02.04	xx		dst.....	
1	02	1.02.04	xx	xx	dst.....	
1	03				Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1	03	1.03.01			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
1	03	1.03.01	15		Program.....	
1	03	1.03.01	15	01	Kegiatan.....	
1	03	1.03.01	15	02	dst.....	
1	03	1.03.01	15	03	dst.....	
1	03	1.03.01	16		Program.....	
1	03	1.03.01	16	01	Kegiatan.....	
1	03	1.03.01	16	02	dst.....	
1	03	1.03.01	16	03	dst.....	
1	03	1.03.01	xx		dst.....	
1	03	1.03.01	xx	xx	dst.....	
1	04				Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	04	1.04.01			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar	
1	04	1.04.01	15		Program.....	
1	04	1.04.01	15	01	Kegiatan.....	
1	04	1.04.01	15	02	dst.....	
1	04	1.04.01	15	03	dst.....	
1	04	1.04.01	16		Program.....	
1	04	1.04.01	16	01	Kegiatan.....	
1	04	1.04.01	16	02	dst.....	
1	04	1.04.01	16	03	dst.....	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
1	04	1.04.01	xx		dst.....	
1	04	1.04.01	xx	xx	dst.....	
1	04	1.03.01			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar	
1	04	1.03.01	xx		dst.....	
1	04	1.03.01	xx	01	dst.....	
1	04	1.03.01	xx	02	dst.....	
1	04	1.03.01	xx	03	dst.....	
1	04	1.03.01	xx		dst.....	
1	04	1.03.01	xx	01	dst.....	
1	05				Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	
1	05	1.05.01			Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar	
1	05	1.05.01	15		Program.....	
1	05	1.05.01	15	01	Kegiatan.....	
1	05	1.05.01	15	02	dst.....	
1	05	1.05.01	15	03	dst.....	
1	05	1.05.01	16		Program.....	
1	05	1.05.01	16	01	Kegiatan.....	
1	05	1.05.01	16	02	dst.....	
1	05	1.05.01	16	03	dst.....	
1	05	1.05.01	xx		dst.....	
1	05	1.05.01	xx	xx	dst.....	
1	05	1.05.02			Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalbar	
1	05	1.05.02	15		Program.....	
1	05	1.05.02	15	01	Kegiatan.....	
1	05	1.05.02	15	02	dst.....	
1	05	1.05.02	15	03	dst.....	
1	05	1.05.02	16		Program.....	
1	05	1.05.02	16	01	Kegiatan.....	
1	05	1.05.02	16	02	dst.....	
1	05	1.05.02	16	03	dst.....	
1	05	1.05.02	xx		dst.....	
1	05	1.05.02	xx	xx	dst.....	
1	06				Sosial	
1	06	1.06.01			Dinas Sosial Prov. Kalimantan Barat	
1	06	1.06.01	15		Program.....	
1	06	1.06.01	15	01	Kegiatan.....	
1	06	1.06.01	15	02	dst.....	
1	06	1.06.01	15	03	dst.....	
1	06	1.06.01	16		Program.....	
1	06	1.06.01	16	01	Kegiatan.....	
1	06	1.06.01	16	02	dst.....	
1	06	1.06.01	16	03	dst.....	
1	06	1.06.01	xx		dst.....	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
1	06	1.06.01	xx	xx	dst.....	
2					URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	
2	01				Tenaga Kerja	
2	01	2.01.01			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
2	01	2.01.01	15		Program.....	
2	01	2.01.01	15	01	Kegiatan.....	
2	01	2.01.01	15	02	dst.....	
2	01	2.01.01	15	03	dst.....	
2	01	2.01.01	16		Program.....	
2	01	2.01.01	16	01	Kegiatan.....	
2	01	2.01.01	16	02	dst.....	
2	01	2.01.01	16	03	dst.....	
2	01	2.01.01	xx		dst.....	
2	01	2.01.01	xx	xx	dst.....	
2	02				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	02	2.02.01			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kalbar	
2	02	2.02.01	15		Program.....	
2	02	2.02.01	15	01	Kegiatan.....	
2	02	2.02.01	15	02	dst.....	
2	02	2.02.01	15	03	dst.....	
2	02	2.02.01	16		Program.....	
2	02	2.02.01	16	01	Kegiatan.....	
2	02	2.02.01	16	02	dst.....	
2	02	2.02.01	16	03	dst.....	
2	02	2.02.01	xx		dst.....	
2	02	Pangan	xx	xx	dst.....	
2	03				Pangan	
2	03	2.03.01			Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar	
2	03	2.03.01	15		Program.....	
2	03	2.03.01	15	01	Kegiatan.....	
2	03	2.03.01	15	02	dst.....	
2	03	2.03.01	15	03	dst.....	
2	03	2.03.01	16		Program.....	
2	03	2.03.01	16	01	Kegiatan.....	
2	03	2.03.01	16	02	dst.....	
2	03	2.03.01	16	03	dst.....	
2	03	2.03.01	xx		dst.....	
2	03	2.03.01	xx	xx	dst.....	
2	05				Lingkungan Hidup	
2	05	1.04.01			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Prov. Kalbar	
2	05	1.04.01	xx		Program.....	
2	05	1.04.01	xx	01	Kegiatan.....	

✓

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
2	05	1.04.01	xx	02	dst.....	
2	05	1.04.01	xx	03	dst.....	
2	05	1.04.01	xx		Program.....	
2	05	1.04.01	xx	01	Kegiatan.....	
2	05	1.04.01	xx	02	dst.....	
2	05	1.04.01	xx	03	dst.....	
2	05	1.04.01	xx		dst.....	
2	05	1.04.01	xx	xx	dst.....	
2	06	2.06.01			Administrasi Kependudukan dan catatan sipil	
2	06	2.06.01	15		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar	
2	06	2.06.01	15		Program.....	
2	06	2.06.01	15	01	Kegiatan.....	
2	06	2.06.01	15	02	dst.....	
2	06	2.06.01	15	03	dst.....	
2	06	2.06.01	16		Program.....	
2	06	2.06.01	16	01	Kegiatan.....	
2	06	2.06.01	16	02	dst.....	
2	06	2.06.01	16	03	dst.....	
2	06	2.06.01	xx		dst.....	
2	06	2.06.01	xx	xx	dst.....	
2	07				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	07	2.07.01			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalbar	
2	07	2.07.01	15		Program.....	
2	07	2.07.01	15	01	Kegiatan.....	
2	07	2.07.01	15	02	dst.....	
2	07	2.07.01	15	03	dst.....	
2	07	2.07.01	16		Program.....	
2	07	2.07.01	16	01	Kegiatan.....	
2	07	2.07.01	16	02	dst.....	
2	07	2.07.01	16	03	dst.....	
2	07	2.07.01	xx		dst.....	
2	07	2.07.01	xx	xx	dst.....	
2	08				Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2	08	2.06.01			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar	
2	08	2.06.01	xx		Program.....	
2	08	2.06.01	xx	01	Kegiatan.....	
2	08	2.06.01	xx	02	dst.....	
2	08	2.06.01	xx	03	dst.....	
2	08	2.06.01	xx		Program.....	
2	08	2.06.01	xx	01	Kegiatan.....	
2	08	2.06.01	xx	02	dst.....	
2	08	2.06.01	xx	03	dst.....	
2	08	2.06.01	xx		dst.....	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
2	08	2.06.01	xx	xx	dst.....	
2	09				Perhubungan	
2	09	2.09.01			Dinas Perhubungan Prov. Kalbar	
2	09	2.09.01	15		Program.....	
2	09	2.09.01	15	01	Kegiatan.....	
2	09	2.09.01	15	02	dst.....	
2	09	2.09.01	15	03	dst.....	
2	09	2.09.01	16		Program.....	
2	09	2.09.01	16	01	Kegiatan.....	
2	09	2.09.01	16	02	dst.....	
2	09	2.09.01	16	03	dst.....	
2	09	2.09.01	xx		dst.....	
2	09	2.09.01	xx	xx	dst.....	
2	10				Komunikasi dan Informatika	
2	10	1.01.01			Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
2	10	1.01.01	15		Program.....	
2	10	1.01.01	15	01	Kegiatan.....	
2	10	1.01.01	15	02	dst.....	
2	10	1.01.01	15	03	dst.....	
2	10	1.01.01	16		Program.....	
2	10	1.01.01	16	01	Kegiatan.....	
2	10	1.01.01	16	02	dst.....	
2	10	1.01.01	16	03	dst.....	
2	10	1.01.01	xx		dst.....	
2	10	1.01.01	xx	xx	dst.....	
2	11				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
2	11	2.11.01			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kalbar	
2	11	2.11.01	15		Program.....	
2	11	2.11.01	15	01	Kegiatan.....	
2	11	2.11.01	15	02	dst.....	
2	11	2.11.01	15	03	dst.....	
2	11	2.11.01	16		Program.....	
2	11	2.11.01	16	01	Kegiatan.....	
2	11	2.11.01	16	02	dst.....	
2	11	2.11.01	16	03	dst.....	
2	11	2.11.01	xx		dst.....	
2	11	2.11.01	xx	xx	dst.....	
2	12				Penanaman Modal	
2	12	2.12.01			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalbar	
2	12	2.12.01	15		Program.....	
2	12	2.12.01	15	01	Kegiatan.....	
2	12	2.12.01	15	02	dst.....	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
2	12	2.12.01	15	03	dst.....	
2	12	2.12.01	16		Program.....	
2	12	2.12.01	16	01	Kegiatan.....	
2	12	2.12.01	16	02	dst.....	
2	12	2.12.01	16	03	dst.....	
2	12	2.12.01	xx		dst.....	
2	12	2.12.01	xx	xx	dst.....	
2	13				Kepemudaan dan Olah Raga	
2	13	2.13.01			Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
2	13	2.13.01	15		Program.....	
2	13	2.13.01	15	01	Kegiatan.....	
2	13	2.13.01	15	02	dst.....	
2	13	2.13.01	15	03	dst.....	
2	13	2.13.01	16		Program.....	
2	13	2.13.01	16	01	Kegiatan.....	
2	13	2.13.01	16	02	dst.....	
2	13	2.13.01	16	03	dst.....	
2	13	2.13.01	xx		dst.....	
2	13	2.13.01	xx	xx	dst.....	
2	14				Statistik	
2	14	2.10.01			Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
2	14	2.10.01	xx		Program.....	
2	14	2.10.01	xx	01	Kegiatan.....	
2	14	2.10.01	xx	02	dst.....	
2	14	2.10.01	xx	03	dst.....	
2	14	2.10.01	xx		Program.....	
2	14	2.10.01	xx	01	Kegiatan.....	
2	14	2.10.01	xx	02	dst.....	
2	14	2.10.01	xx	03	dst.....	
2	14	2.10.01	xx		dst.....	
2	14	2.10.01	xx	xx	dst.....	
2	15				Persandian	
2	15	2.10.01			Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar	
2	15	2.10.01	xx		Program.....	
2	15	2.10.01	xx	01	Kegiatan.....	
2	15	2.10.01	xx	02	dst.....	
2	15	2.10.01	xx	03	dst.....	
2	15	2.10.01	xx		Program.....	
2	15	2.10.01	xx	01	Kegiatan.....	
2	15	2.10.01	xx	02	dst.....	
2	15	2.10.01	xx	03	dst.....	
2	15	2.10.01	xx		dst.....	
2	15	2.10.01	xx	xx	dst.....	

KODE			PROGRAM DAN KEGIATAN			PENJELASAN
2	16				Kebudayaan	
2	16	1.01.01			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar	
2	16	1.01.01	xx		Program.....	
2	16	1.01.01	xx	01	Kegiatan.....	
2	16	1.01.01	xx	02	dst.....	
2	16	1.01.01	xx	03	dst.....	
2	16	1.01.01	xx		Program.....	
2	16	1.01.01	xx	01	Kegiatan.....	
2	16	1.01.01	xx	02	dst.....	
2	16	1.01.01	xx	03	dst.....	
2	16	1.01.01	xx		dst.....	
2	16	1.01.01	xx	xx	dst.....	
2	16				Kebudayaan	
2	16	1.01.01			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar	
2	16	1.01.01	xx		Program.....	
2	16	1.01.01	xx	01	Kegiatan.....	
2	16	1.01.01	xx	02	dst.....	
2	16	1.01.01	xx	03	dst.....	
2	16	1.01.01	xx		Program.....	
2	16	1.01.01	xx	01	Kegiatan.....	
2	16	1.01.01	xx	02	dst.....	
2	16	1.01.01	xx	03	dst.....	
2	16	1.01.01	xx		dst.....	
2	16	1.01.01	xx	xx	dst.....	
2	17				Perpustakaan	
2	17	2.17.01			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
2	17	2.17.01	15		Program.....	
2	17	2.17.01	15	01	Kegiatan.....	
2	17	2.17.01	15	02	dst.....	
2	17	2.17.01	15	03	dst.....	
2	17	2.17.01	16		Program.....	
2	17	2.17.01	16	01	Kegiatan.....	
2	17	2.17.01	16	02	dst.....	
2	17	2.17.01	16	03	dst.....	
2	17	2.17.01	xx		dst.....	
2	17	2.17.01	xx	xx	dst.....	
2	18				Kearsipan	
2	18	2.17.01			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar	
2	18	2.17.01	xx		Program.....	
2	18	2.17.01	xx	01	Kegiatan.....	
2	18	2.17.01	xx	02	dst.....	
2	18	2.17.01	xx	03	dst.....	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
2	18	2.17.01	xx		Program.....	
2	18	2.17.01	xx	01	Kegiatan.....	
2	18	2.17.01	xx	02	dst.....	
2	18	2.17.01	xx	03	dst.....	
2	18	2.17.01	xx		dst.....	
2	18	2.17.01	xx	xx	dst.....	
3					URUSAN PILIHAN	
3	01				Kelautan dan Perikanan	
3	01	3.01.01			Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalbar	
3	01	3.01.01	15		Program.....	
3	01	3.01.01	15	01	Kegiatan.....	
3	01	3.01.01	15	02	dst.....	
3	01	3.01.01	15	03	dst.....	
3	01	3.01.01	16		Program.....	
3	01	3.01.01	16	01	Kegiatan.....	
3	01	3.01.01	16	02	dst.....	
3	01	3.01.01	16	03	dst.....	
3	01	3.01.01	xx		dst.....	
3	01	3.01.01	xx	xx	dst.....	
3	02				Pariwisata	
3	02	2.13.01			Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	
3	02	2.13.01	xx		Program.....	
3	02	2.13.01	xx	01	Kegiatan.....	
3	02	2.13.01	xx	02	dst.....	
3	02	2.13.01	xx	03	dst.....	
3	02	2.13.01	xx		Program.....	
3	02	2.13.01	xx	01	Kegiatan.....	
3	02	2.13.01	xx	02	dst.....	
3	02	2.13.01	xx	03	dst.....	
3	02	2.13.01	xx		dst.....	
3	02	2.13.01	xx	xx	dst.....	
3	03				Pertanian	
3	03	3.03.01			Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar	
3	03	3.03.01	15		Program.....	
3	03	3.03.01	15	01	Kegiatan.....	
3	03	3.03.01	15	02	dst.....	
3	03	3.03.01	15	03	dst.....	
3	03	3.03.01	16		Program.....	
3	03	3.03.01	16	01	Kegiatan.....	
3	03	3.03.01	16	02	dst.....	
3	03	3.03.01	16	03	dst.....	
3	03	3.03.01	xx		dst.....	
3	03	3.03.01	xx	xx	dst.....	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
3	03	3.03.02			Dinas Perkebunan Prov. Kalbar	
3	03	3.03.02	15		Program.....	
3	03	3.03.02	15	01	Kegiatan.....	
3	03	3.03.02	15	02	dst.....	
3	03	3.03.02	15	03	dst.....	
3	03	3.03.02	16		Program.....	
3	03	3.03.02	16	01	Kegiatan.....	
3	03	3.03.02	16	02	dst.....	
3	03	3.03.02	16	03	dst.....	
3	03	3.03.02	xx		dst.....	
3	03	3.03.02	xx	xx	dst.....	
3	03	2.03.01			Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar	
3	03	2.03.01	xx		Program.....	
3	03	2.03.01	xx	01	Kegiatan.....	
3	03	2.03.01	xx	02	dst.....	
3	03	2.03.01	xx	03	dst.....	
3	03	2.03.01	xx		Program.....	
3	03	2.03.01	xx	01	Kegiatan.....	
3	03	2.03.01	xx	02	dst.....	
3	03	2.03.01	xx	03	dst.....	
3	03	2.03.01	xx		dst.....	
3	03	2.03.01	xx	xx	dst.....	
3	04				Kehutanan	
3	04	3.04.01			Dinas Kehutanan Prov. Kalbar	
3	04	3.04.01	15		Program.....	
3	04	3.04.01	15	01	Kegiatan.....	
3	04	3.04.01	15	02	dst.....	
3	04	3.04.01	15	03	dst.....	
3	04	3.04.01	16		Program.....	
3	04	3.04.01	16	01	Kegiatan.....	
3	04	3.04.01	16	02	dst.....	
3	04	3.04.01	16	03	dst.....	
3	04	3.04.01	xx		dst.....	
3	04	3.04.01	xx	xx	dst.....	
3	05				Energi dan Sumberdaya Mineral	
3	05	3.05.01			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar	
3	05	3.05.01	15		Program.....	
3	05	3.05.01	15	01	Kegiatan.....	
3	05	3.05.01	15	02	dst.....	
3	05	3.05.01	15	03	dst.....	
3	05	3.05.01	16		Program.....	
3	05	3.05.01	16	01	Kegiatan.....	
3	05	3.05.01	16	02	dst.....	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
3	05	3.05.01	16	03	dst.....	
3	05	3.05.01	xx		dst.....	
3	05	3.05.01	xx	xx	dst.....	
3	06				Perdagangan	
3	06	3.06.01			Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
3	06	3.06.01	15		Program.....	
3	06	3.06.01	15	01	Kegiatan.....	
3	06	3.06.01	15	02	dst.....	
3	06	3.06.01	15	03	dst.....	
3	06	3.06.01	16		Program.....	
3	06	3.06.01	16	01	Kegiatan.....	
3	06	3.06.01	16	02	dst.....	
3	06	3.06.01	16	03	dst.....	
3	06	3.06.01	xx		dst.....	
3	06	3.06.01	xx	xx	dst.....	
3	07				Perindustrian	
3	07	3.06.01			Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kalbar	
3	07	3.06.01	xx		Program.....	
3	07	3.06.01	xx	01	Kegiatan.....	
3	07	3.06.01	xx	02	dst.....	
3	07	3.06.01	xx	03	dst.....	
3	07	3.06.01	xx		Program.....	
3	07	3.06.01	xx	01	Kegiatan.....	
3	07	3.06.01	xx	02	dst.....	
3	07	3.06.01	xx	03	dst.....	
3	07	3.06.01	xx		dst.....	
3	07	3.06.01	xx	xx	dst.....	
3	08				Transmigrasi	
3	08	2.01.01			Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar	
3	08	2.01.01	xx		Program.....	
3	08	2.01.01	xx	01	Kegiatan.....	
3	08	2.01.01	xx	02	dst.....	
3	08	2.01.01	xx	03	dst.....	
3	08	2.01.01	xx		Program.....	
3	08	2.01.01	xx	01	Kegiatan.....	
3	08	2.01.01	xx	02	dst.....	
3	08	2.01.01	xx	03	dst.....	
3	08	2.01.01	xx		dst.....	
3	08	2.01.01	xx	xx	dst.....	
4					URUSAN PENUNJANG	
4	01				Perencanaan	

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
4	01	4.01.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kalbar	
4	01	4.01.01	15	Program.....	
4	01	4.01.01	15 01	Kegiatan.....	
4	01	4.01.01	15 02	dst.....	
4	01	4.01.01	15 03	dst.....	
4	01	4.01.01	16	Program.....	
4	01	4.01.01	16 01	Kegiatan.....	
4	01	4.01.01	16 02	dst.....	
4	01	4.01.01	16 03	dst.....	
4	01	4.01.01	xx	dst.....	
4	01	4.01.01	xx xx	dst.....	
4	02			Keuangan	
4	02	4.02.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
4	02	4.02.01	15	Program.....	
4	02	4.02.01	15 01	Kegiatan.....	
4	02	4.02.01	15 02	dst.....	
4	02	4.02.01	15 03	dst.....	
4	02	4.02.01	16	Program.....	
4	02	4.02.01	16 01	Kegiatan.....	
4	02	4.02.01	16 02	dst.....	
4	02	4.02.01	16 03	dst.....	
4	02	4.02.01	xx	dst.....	
4	02	4.02.01	xx xx	dst.....	
4	03			Kepegawaian	
4	03	4.03.01		Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar	
4	03	4.03.01	15	Program.....	
4	03	4.03.01	15 01	Kegiatan.....	
4	03	4.03.01	15 02	dst.....	
4	03	4.03.01	15 03	dst.....	
4	03	4.03.01	16	Program.....	
4	03	4.03.01	16 01	Kegiatan.....	
4	03	4.03.01	16 02	dst.....	
4	03	4.03.01	16 03	dst.....	
4	03	4.03.01	xx	dst.....	
4	03	4.03.01	xx xx	dst.....	
4	04			Pendidikan dan Pelatihan	
4	04	4.04.01		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Kalbar	
4	04	4.04.01	15	Program.....	
4	04	4.04.01	15 01	Kegiatan.....	
4	04	4.04.01	15 02	dst.....	
4	04	4.04.01	15 03	dst.....	
4	04	4.04.01	16	Program.....	
4	04	4.04.01	16 01	Kegiatan.....	

KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
4	04	4.04.01	16	02	dst.....	
4	04	4.04.01	16	03	dst.....	
4	04	4.04.01	xx		dst.....	
4	04	4.04.01	xx	xx	dst.....	
4	05				Penelitian dan Pengembangan	
4	05	4.05.01			Badan Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalbar	
4	05	4.05.01	15		Program.....	
4	05	4.05.01	15	01	Kegiatan.....	
4	05	4.05.01	15	02	dst.....	
4	05	4.05.01	15	03	dst.....	
4	05	4.05.01	16		Program.....	
4	05	4.05.01	16	01	Kegiatan.....	
4	05	4.05.01	16	02	dst.....	
4	05	4.05.01	16	03	dst.....	
4	05	4.05.01	xx		dst.....	
4	05	4.05.01	xx	xx	dst.....	
4	06				Pengawasan	
4	06	4.06.01			Inspektorat Provinsi Kalbar	
4	06	4.06.01	15		Program.....	
4	06	4.06.01	15	01	Kegiatan.....	
4	06	4.06.01	15	02	dst.....	
4	06	4.06.01	15	03	dst.....	
4	06	4.06.01	16		Program.....	
4	06	4.06.01	16	01	Kegiatan.....	
4	06	4.06.01	16	02	dst.....	
4	06	4.06.01	16	03	dst.....	
4	06	4.06.01	xx		dst.....	
4	06	4.06.01	xx	xx	dst.....	
4	10				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
4	10	4.10.01			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kalbar	
4	10	4.10.01	15		Program.....	
4	10	4.10.01	15	01	Kegiatan.....	
4	10	4.10.01	15	02	dst.....	
4	10	4.10.01	15	03	dst.....	
4	10	4.10.01	16		Program.....	
4	10	4.10.01	16	01	Kegiatan.....	
4	10	4.10.01	16	02	dst.....	
4	10	4.10.01	16	03	dst.....	
4	10	4.10.01	xx		dst.....	
4	10	4.10.01	xx	xx	dst.....	
4	11				Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan	

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	PENJELASAN
4	11	4.11.01		Badan Penghubung Prov. Kalbar di Jakarta	
4	11	4.11.01	15	Program.....	
4	11	4.11.01	15	01 Kegiatan.....	
4	11	4.11.01	15	02 dst.....	
4	11	4.11.01	15	03 dst.....	
4	11	4.11.01	16	Program.....	
4	11	4.11.01	16	01 Kegiatan.....	
4	11	4.11.01	16	02 dst.....	
4	11	4.11.01	16	03 dst.....	
4	11	4.11.01	xx	dst.....	
4	11	4.11.01	xx	xx dst.....	
5				URUSAN PENDUKUNG	
5	01			Sekretariat Daerah Prov. Kalbar	
5	01	5.01.01		Sekretariat Daerah Prov. Kalbar	
5	01	5.01.01	15	Program.....	
5	01	5.01.01	15	01 Kegiatan.....	
5	01	5.01.01	15	02 dst.....	
5	01	5.01.01	15	03 dst.....	
5	01	5.01.01	16	Program.....	
5	01	5.01.01	16	01 Kegiatan.....	
5	01	5.01.01	16	02 dst.....	
5	01	5.01.01	16	03 dst.....	
5	01	5.01.01	xx	dst.....	
5	01	5.01.01	xx	xx dst.....	
5	02			Sekretariat Daerah Prov. Kalbar	
5	02	5.02.01		Sekretariat Daerah Prov. Kalbar	
5	02	5.02.01	15	Program.....	
5	02	5.02.01	15	01 Kegiatan.....	
5	02	5.02.01	15	02 dst.....	
5	02	5.02.01	15	03 dst.....	
5	02	5.02.01	16	Program.....	
5	02	5.02.01	16	01 Kegiatan.....	
5	02	5.02.01	16	02 dst.....	
5	02	5.02.01	16	03 dst.....	
5	02	5.02.01	xx	dst.....	
5	02	5.02.01	xx	xx dst.....	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SUTARMIDJI

C. KODE REKENING PENDAPATAN

KODE	URAIAN	KETERANGAN
4.	PENDAPATAN DAERAH	DIGIT
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 = Akun Pendapatan
4.1.1.	Pajak Daerah1)	2 = Kelompok Pendapatan
4.1.1.01.	Pajak Kendaraan Bermotor	3 = Jenis Pendapatan
4.1.1.01.01.	A-1 Sedan, Jeep, Mini Bus (Tidak Umum)	4 = Objek Pendapatan
4.1.1.01.02.	A-2 Sedan, Jeep, Mini Bus (Umum)	5 = Rincian Objek Pendapatan
4.1.1.01.03.	A-3 Sedan, Jeep, Mini Bus (Dinas)	
4.1.1.01.04.	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	
4.1.1.01.05.	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	
4.1.1.01.06.	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	
4.1.1.01.07.	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	
4.1.1.01.08.	C-2 Truck, Pick up (Umum)	
4.1.1.01.09.	C-3 Truck, Pick up (Dinas)	
4.1.1.01.10.	D Kendaraan khusus	
4.1.1.01.11.	E-1 Sepeda Motor, Scooter (Tidak Umum)	
4.1.1.01.12.	E-2 Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	
4.1.1.01.13.	F. Kendaraan diatas Air	
4.1.1.01.14.	Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	
4.1.1.01.15.	Dst.....	
4.1.1.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
4.1.1.02.01.	A-1 Sedan, Jeep, Mini Bus (Tidak Umum)	
4.1.1.02.02.	A-2 Sedan, Jeep, Mini Bus (Umum)	
4.1.1.02.03.	A-3 Sedan, Jeep, Mini Bus (Dinas)	
4.1.1.02.04.	B-1 Bus, Micro Bus (Tidak Umum)	
4.1.1.02.05.	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	
4.1.1.02.06.	B-3 Bus, Micro Bus (Dinas)	
4.1.1.02.07.	C-1 Truck, Pick Up (Tidak Umum)	
4.1.1.02.08.	C-2 Truck, Pick Up (Umum)	
4.1.1.02.09.	C-3 Truck, Pick Up (Dinas)	
4.1.1.02.10.	D. Kendaraan khusus	
4.1.1.02.11.	E-1 Sepeda Motor, Scooter (Tidak Umum)	
4.1.1.02.12.	E-2 Sepeda Motor, Scooter (Dinas)	
4.1.1.02.13.	F. Kendaraan diatas Air	
4.1.1.02.14.	Dst.....	
4.1.1.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
4.1.1.03.01.	Bensin/Premium dan sejenisnya	
4.1.1.03.02.	Pertamax dan sejenisnya	
4.1.1.03.03.	Solar dan sejenisnya	
4.1.1.03.04.	Dst.....	
4.1.1.04.	Pajak Air Permukaan	
4.1.1.04.01.	Pajak Air Permukaan (PAP)	
4.1.1.04.02.	Pajak Air Bawah Tanah	
4.1.1.04.03.	Dst.....	
4.1.1.05.	Pajak Rokok	
4.1.1.05.01.	Pajak Rokok	
4.1.1.05.02.	Dst.....	
4.1.2.	Retribusi Daerah	
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
4.1.2.01.02.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
4.1.2.01.03.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
4.1.2.01.06.	Retribusi Pengujian Kualitas Lingkungan	
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan	
4.1.2.01.08.	Retribusi Pelayanan jasa standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang	
4.1.2.01.09.	Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan	
4.1.2.01.10.	Dst.....	
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	
4.1.2.02.01.	Retribusi Pcmakaian Kekayaan Daerah	
4.1.2.02.02.	Retribusi Tempat Pelelangan	
4.1.2.02.03.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/villa	
4.1.2.02.04.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
4.1.2.02.05.	Retribusi Tempat rekreasi dan Olah Raga	
4.1.2.02.06.	Retribusi Penyebrangan di Air	
4.1.2.02.07.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
4.1.2.02.08.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
4.1.2.02.09.	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan	
4.1.2.02.10.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	
4.1.2.02.11.	Dst.....	
4.1.2.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	
4.1.2.03.01.	Retribusi Izin Trayek	
4.1.2.03.02.	Retribusi Izin Penggunaan Peruntukan Tanah	
4.1.2.03.03.	Retribusi Izin Sektor usaha Perikanan	
4.1.2.03.04.	Retribusi Perizinan Higien	
4.1.2.03.05.	Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	
4.1.2.03.06.	Dst.....	
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
4.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
4.1.3.01.01.	PT Bank Kalbar	
4.1.3.01.02.	PD Aneka Usaha	
4.1.3.01.03.	PT. Askrida	
4.1.3.01.04.	PT. Jamkrida	
4.1.3.02.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
4.1.3.02.01.	BUMN	
4.1.3.02.02.	Dst.....	
4.1.3.03.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta	
4.1.3.03.01.	Perusahaan	
4.1.3.03.03.	Dst.....	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	
4.1.4.01.01.	Pelepasan Hak Atas Tanah	
4.1.4.01.02.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	
4.1.4.01.03.	Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai	
4.1.4.01.04.	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
4.1.4.01.05.	Penjualan Kendaraan Dinas roda dua	
4.1.4.01.06.	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	
4.1.4.01.07.	Penjualan Drum Bekas	
4.1.4.01.08.	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	
4.1.4.01.09.	Penjualan Lampu Hias Bekas	
4.1.4.01.10.	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan	
4.1.4.01.11.	Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas	
4.1.4.01.12.	Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi	
4.1.4.01.13.	Penjualan hasil pertanian	
4.1.4.01.14.	Penjualan hasil kehutanan	
4.1.4.01.15.	Penjualan hasil perkebunan	
4.1.4.01.16.	Penjualan hasil peternakan	
4.1.4.01.17.	Penjualan hasil perikanan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
4.1.4.01.18.	Penjualan hasil sitaan	
4.1.4.01.19.	Dst.....	
4.1.4.02.	Penerimaan Jasa Giro	
4.1.4.02.01.	Jasa Giro Kas Daerah	
4.1.4.02.02.	Jasa Giro Pemegang Kas/Bendahara	
4.1.4.02.03.	Jasa Giro Dana Cadangan	
4.1.4.02.04.	Dst.....	
4.1.4.03.	Pendapatan Bunga	
4.1.4.03.01.	Rekening Deposito pada Bank	
4.1.4.03.02.	Pendapatan Bunga Industri Kecil	
4.1.4.03.03.	Pendapatan Bunga Pasar Desa	
4.1.4.04.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	
4.1.4.04.01.	Kerugian Uang	
4.1.4.04.02.	Kerugian Barang	
4.1.4.04.03.	Dst.....	
4.1.4.05.	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
4.1.4.05.01.	Penerimaan Komisi dari penempatan Kas Daerah	
4.1.4.05.02.	Penerimaan Potongan	
4.1.4.05.03.	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
4.1.4.05.04.	Dst.....	
4.1.4.06.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
4.1.4.06.01.	Bidang Pendidikan	
4.1.4.06.02.	Bidang Kesehatan	
4.1.4.06.03.	Bidang Pekerjaan Umum	
4.1.4.06.04.	Bidang Perumahan Rakyat	
4.1.4.06.05.	Bidang Penataan Ruang	
4.1.4.06.06.	Bidang Perencanaan Pembangunan	
4.1.4.06.07.	Bidang Perhubungan	
4.1.4.06.08.	Bidang Lingkungan Hidup	
4.1.4.06.09.	Bidang Pertanahan	
4.1.4.06.10.	Bidang Pertanian	
4.1.4.06.11.	Denda Keterlambatan	
4.1.4.06.12.	Pemotongan Penghasilan Lainnya	
4.1.4.06.13.	Dst.....	
4.1.4.07.	Pendapatan Denda Pajak 1)	
4.1.4.07.01.	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	
4.1.4.07.02.	Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
4.1.4.07.03.	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	
4.1.4.07.04.	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
4.1.4.07.05.	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	
4.1.4.07.06.	Pendapatan Denda Pajak Rokok	
4.1.4.07.06.	Dst.....	
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Retribusi 1)	
4.1.4.08.01.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	
4.1.4.08.02.	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	
4.1.4.08.03.	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	
4.1.4.08.04.	Dst.....	
4.1.4.09.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
4.1.4.09.01.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	
4.1.4.09.02.	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembokaran Reklame	
4.1.4.09.03.	Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman	
4.1.4.09.04.	Dst.....	
4.1.4.10.	Pendapatan dari Pengembalian	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
4.1.4.10.01.	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21	
4.1.4.10.02.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan	
4.1.4.10.03.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan	
4.1.4.10.04.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas	
4.1.4.10.05.	Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka	
4.1.4.10.06.	Pendapatan dari Pengembalian pinjaman penyertaan modal	
4.1.4.10.07.	Pendapatan dari Pengembalian hasil temuan tim pemeriksa	
4.1.4.10.08.	Pendapatan dari pengembalian lain-lain tahun - tahun sebelumnya	
4.1.4.10.09.	Pendapatan dari Pengembalian UYHD	
4.1.4.10.10.	Pendapatan dari Pengembalian HKPG	
4.1.4.10.11.	Pendapatan dari Penerimaan Lainnya	
4.1.4.11.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
4.1.4.11.01.	Fasilitas Sosial	
4.1.4.11.02.	Fasilitas Umum	
4.1.4.11.03.	Dst.....	
4.1.4.12.	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
4.1.4.12.01.	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk	
4.1.4.12.02.	Uang Sekolah / Pendidikan dan Pelatihan	
4.1.4.12.03.	Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas	
4.1.4.12.04.	Kontribusi Kabupaten / Kota dalam Penyelenggaraan Diklat Struktural dan Fungsional	
4.1.4.12.05.	Kontribusi Penyelenggaraan Uji Kopetensi	
4.1.4.12.06.	Dst.....	
4.1.4.13.	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
4.1.4.13.01.	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	
4.1.4.13.02.	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan	
4.1.4.13.03.	Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah	
4.1.4.13.04.	Dst.....	
4.1.4.14.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
4.1.4.14.01.	Dari Kelompok Masyarakat	
4.1.4.14.02.	Dst.....	
4.1.4.15.	Pendapatan BLUD	
4.1.4.15.01.	Pendapatan BLUD Rumah Sakit	
4.1.4.15.02.	Dst.....	
4.1.4.16.	Pendapatan denda Pemanfaatan Aset Daerah	
4.1.4.16.01.	Pendapatan denda Sewa Aset Daerah	
4.1.4.16.02.	Pendapatan denda Kerja Sama Pemanfaatan Aset Daerah	
4.1.4.16.03.	Pendapatan denda Bangun Guna Serah	
4.1.4.16.04.	Pendapatan denda Bangun Serah Guna	
4.1.4.16.05.	Dst.....	
4.1.4.17.	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	
4.1.4.17.01.	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	
4.1.4.17.02.	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah kerja sama Pemanfaatan	
4.1.4.17.03.	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	
4.1.4.17.04.	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	
4.1.4.17.05.	Dst.....	
4.1.4.18.	Kontribusi Penyelenggaraan Uji Kompetensi	
4.1.4.18.01.	Retribusi Penyelenggaraan Uji Kompetensi	
4.1.4.18.02.	Dst	
4.2.	DANA PERIMBANGAN	
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	
4.2.1.01.02.	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
4.2.1.01.03.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri	
4.2.1.01.04.	Penerimaan dari Pemungutan Biaya PBB	
4.2.1.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	
4.2.1.01.06.	Bagi Hasil dari Cukai Hasil tembakau	
4.2.1.01.07.	Dst.....	
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
4.2.1.02.01.	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	
4.2.1.02.03.	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	
4.2.1.02.04.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	
4.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	
4.2.1.02.06.	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	
4.2.1.02.09.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	
4.2.1.02.10.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	
4.2.1.02.11.	Dst.....	
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	
4.2.3.01.	Dana alokasi khusus Fisik	
4.2.3.01.01.	Bidang Reboisasi	
4.2.3.01.02.	Bidang Non Reboisasi	
4.2.3.01.03.	Bidang Pendidikan	
4.2.3.01.04.	Bidang Kesehatan	
4.2.3.01.05.	Bidang Pertanian	
4.2.3.01.06.	Bidang Infrastruktur Jalan dan Irigasi	
4.2.3.01.07.	Bidang Kelautan dan Perikanan	
4.2.3.01.08.	Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi	
4.2.3.01.09.	Bidang Kehutanan	
4.2.3.01.10.	Bidang Lingkungan Hidup	
4.2.3.01.11.	Bidang Pertambangan dan Energi	
4.2.3.01.12.	Bidang Energi dan Sumberdaya mineral	
4.2.3.01.13.	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
4.2.3.01.14.	Dst.....	
4.2.3.02.	Dana alokasi khusus Non Fisik	
4.2.3.02.01.	BOS Satuan Pendidikan	
4.2.3.02.02.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	
4.2.3.02.03.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	
4.2.3.02.04.	Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi	
4.2.3.02.05.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usaha Dini	
4.2.3.02.06.	Bidang Kesehatan	
4.2.3.02.07.	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
4.2.3.02.08.	Bidang Ketenagakerjaan	
4.2.3.02.09.	Tunjangan Khusus Guru	
4.2.3.02.10.	Bidang Administrasi kependudukan	
4.2.3.02.11.	Bidang Infrastruktur Jalan dan irigasi	
4.2.3.02.12.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	
4.2.3.02.13.	Dst.....	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
4.3.1.	Pendapatan Hibah	
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
4.3.1.01.01.	Hibah dari Pemerintah Pusat	
4.3.1.01.02.	Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID)	
4.3.1.01.03.	Dan Peningkatan pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID)	
4.3.1.01.04.	Dst.....	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
4.3.1.02.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya	
4.3.1.02.01.	Pemerintah Daerah	
4.3.1.02.02.	Pemerintah Kabupaten Kota	
4.3.1.02.04.	Dst.....	
4.3.1.03.	Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri	
4.3.1.03.01.	Badan/lembaga/organisasi	
4.3.1.03.02.	Sumbangan Pihak Ketiga	
4.3.1.03.03.	Pendapatan dari Jasa Raharja	
4.3.1.03.04.	Pendapatan dari Jasa Raharja Putra	
4.3.1.03.05.	Dst.....	
4.3.1.04.	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	
4.3.1.04.01.	Kelompok masyarakat/perorangan	
4.3.1.04.02.	Dst.....	
4.3.1.05.	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
4.3.1.05.01.	Pendapatan Hibah dari Bilateral	
4.3.1.05.02.	Pendapatan Hibah dari Multilateral	
4.3.1.05.03.	Pendapatan Hibah dari Donor lainnya	
4.3.1.05.04.	Dst.....	
4.3.2.	Dana Darurat	
4.3.2.01.	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
4.3.2.01.01.	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
4.3.2.01.02.	Dst.....	
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
4.3.3.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)	
4.3.3.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.02.	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air	
4.3.3.01.03.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.04.	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air	
4.3.3.01.05.	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
4.3.3.01.06.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	
4.3.3.01.07.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	
4.3.3.01.08.	Dst.....	
4.3.3.02.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
4.3.3.02.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten .	
4.3.3.02.02.	Dst.....	
4.3.3.03.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
4.3.3.03.01.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota.	
4.3.3.03.02.	Dst.....	
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
4.3.4.01.	Dana Penyesuaian	
4.3.4.01.01.	Penyesuaian Dana fiskal dan Otonomi Khusus	
4.3.4.01.02.	BOS Satuan Pendidikan Dasar	
4.3.4.01.03.	Tambahan Penghasilan Guru	
4.3.4.01.04.	Dana Insentif Daerah	
4.3.4.01.05.	Dst.....	
4.3.4.02.	Dana Otonomi Khusus	
4.3.4.02.01.	Dana Otonomi Khusus	
4.3.4.02.02.	Dst.....	
4.3.5.	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	
4.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	
4.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi.	
4.3.5.01.02.	Dst.....	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
4.3.5.02.	Bantuan keuangan dari kabupaten	
4.3.5.02.01.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
4.3.5.02.02.	Dst.....	
4.3.5.03.	Bantuan keuangan dari kota	
4.3.5.03.01.	Bantuan Keuangan dari Kota	
4.3.5.03.02.	Dst.....	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SUTARMIDJI

D. KODE REKENING BELANJA

KODE	URAIAN	KETERANGAN
5.	BELANJA DAERAH	DIGIT
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1 = Akun Belanja
5.1.1.	Belanja Pegawai	2 = Kelompok Belanja
5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	3 = Jenis Belanja
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4 = Objek Belanja
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	5 = Rincian Objek Belanja
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	
5.1.1.01.05.	Tunjangan Umum	
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh	
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	
5.1.1.01.10.	Uang Paket	
5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	
5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	
5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	
5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	
5.1.1.01.17.	Uang Duka Wafat/Tewas	
5.1.1.01.18.	Uang Jasa Pengabdian	
5.1.1.01.19.	Tunjangan Badan Legislasi Daerah	
5.1.1.01.20.	Tunjangan Khusus	
5.1.1.01.21.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	
5.1.1.01.22.	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	
5.1.1.01.23.	dst	
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	
5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas	
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi	
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja	
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	
5.1.1.02.07.	Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD	
5.1.1.02.08.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	
5.1.1.02.09.	Tunjangan Khusus Guru PNSD	
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	
5.1.1.03.01.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	
5.1.1.03.02.	Tunjangan Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
5.1.1.03.03.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	
5.1.1.03.04.	Tunjangan Reses	
5.1.1.03.05.	Tunjangan Transport	
5.1.1.03.06.	dst....	
5.1.1.04.	Biaya Pemungutan Pendapatan Daerah	
5.1.1.04.01.	Biaya Pemungutan PBB	
5.1.1.04.02.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.04.03.	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah	
5.1.1.04.04.	dst....	
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.05.01.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
5.1.1.05.02.	dst....	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5.1.1.06.02.	dst....	
5.1.1.07.	Belanja jasa Pengelolaan Kas Daerah	
5.1.1.07.01.	Belanja Jasa Pengelolaan Dana Kas Umum Daerah	
5.1.1.07.02.	dst....	
5.1.2.	BELANJA BUNGA	
5.1.2.01.	Bunga Utang Pinjaman	
5.1.2.01.01.	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	
5.1.2.01.02.	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5.1.2.01.03.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	
5.1.2.01.04.	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	
5.1.2.01.05.	dst....	
5.1.2.02.	Bunga Utang Obligasi	
5.1.2.02.01.	Bunga Utang Obligasi.	
5.1.2.02.02.	dst....	
5.1.3.	BELANJA SUBSIDI	
5.1.3.01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
5.1.3.01.01.	Belanja Subsidi kepada Perusahaan	
5.1.3.01.02.	Belanja Subsidi kepada Lembaga	
5.1.3.01.03.	dst....	
5.1.3.02.	Dst....	
5.1.3.02.01.	dst....	
5.1.4.	Belanja Hibah	
5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
5.1.4.01.01.	Belanja Hibah Kepada	
5.1.4.01.02.	dst....	
5.1.4.02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	
5.1.4.02.01.	Pemerintah Daerah.....	
5.1.4.02.02.	Pemerintah Kabupaten / Kota....	
5.1.4.02.03.	dst....	
5.1.4.03.	Belanja Hibah kepada Pemerintahan Desa	
5.1.4.03.01.	Pemerintahan Desa.....	
5.1.4.03.02.	dst....	
5.1.4.04.	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN.	
5.1.4.04.01.	Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN.....	
5.1.4.04.02.	dst....	
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	
5.1.4.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pendidikan	
5.1.4.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Pemuda dan Olahraga	
5.1.4.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan	
5.1.4.05.04.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan	
5.1.4.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Seni Budaya	
5.1.4.05.06.	dst....	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
5.1.4.06.	Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat	
5.1.4.06.01.	Belanja Hibah	
5.1.4.06.02.	dst....	
5.1.4.07.	Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Negeri	
5.1.4.07.01.	Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Sambas	
5.1.4.07.02.	Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Mempawah	
5.1.4.07.03.	Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Sanggau	
5.1.4.07.04.	Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Ketapang	
5.1.4.07.05.	Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Sintang	
5.1.4.07.06.	Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Kapuas Hulu	
5.1.4.07.07.	Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Bengkayang	
5.1.4.07.08.	Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Landak	
5.1.4.07.09.	Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Sekadau	
5.1.4.07.10.	Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Melawi	
5.1.4.07.11.	Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Kayong Utara	
5.1.4.07.12.	Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kabupaten Kubu Raya	
5.1.4.07.13.	Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kota Pontianak	
5.1.4.07.14.	Satuan Pendidikan Dasar Negeri Kota Singkawang	
5.1.4.07.15.	Dana Cadangan BOS	
5.1.4.07.16.	dst....	
5.1.4.08.	Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Menengah Negeri	
5.1.4.08.01.	Satuan Pendidikan Menengah Negeri Kabupaten Sambas	
5.1.4.08.02.	Satuan Pendidikan Menengah Negeri Kabupaten Mempawah	
5.1.4.08.03.	Satuan Pendidikan Menengah Negeri Kabupaten Sanggau	
5.1.4.08.04.	Satuan Pendidikan Menengah Negeri Kabupaten Ketapang	
5.1.4.08.05.	Satuan Pendidikan Menengah Negeri Kabupaten Sintang	
5.1.4.08.06.	Satuan Pendidikan Menengah Negeri Kabupaten Kapuas Hulu	
5.1.4.08.07.	Satuan Pendidikan Menengah Negeri Kabupaten Bengkayang	
5.1.4.08.08.	Satuan Pendidikan Menengah Negeri Kabupaten Landak	
5.1.4.08.09.	Satuan Pendidikan Menengah Negeri Kabupaten Sekadau	
5.1.4.08.10.	Satuan Pendidikan Menengah Negeri Kabupaten Melawi	
5.1.4.08.11.	Satuan Pendidikan Menengah Negeri Kabupaten Kayong Utara	
5.1.4.08.12.	Satuan Pendidikan Menengah Negeri Kabupaten Kubu Raya	
5.1.4.08.13.	Satuan Pendidikan Menengah Negeri Kota Pontianak	
5.1.4.08.14.	Satuan Pendidikan Menengah Negeri Kota Singkawang	
5.1.4.08.15.	Dana Cadangan BOS	
5.1.4.08.16.	dst....	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.1.4.09.	Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Swasta	
5.1.4.09.01.	Satuan Pendidikan Dasar Swasta Kabupaten Sambas	
5.1.4.09.02.	Satuan Pendidikan Dasar Swasta Kabupaten Mempawah	
5.1.4.09.03.	Satuan Pendidikan Dasar Swasta Kabupaten Sanggau	
5.1.4.09.04.	Satuan Pendidikan Dasar Swasta Kabupaten Ketapang	
5.1.4.09.05.	Satuan Pendidikan Dasar Swasta Kabupaten Sintang	
5.1.4.09.06.	Satuan Pendidikan Dasar Swasta Kabupaten Kapuas Hulu	
5.1.4.09.07.	Satuan Pendidikan Dasar Swasta Kabupaten Bengkayang	
5.1.4.09.08.	Satuan Pendidikan Dasar Swasta Kabupaten Landak	
5.1.4.09.09.	Satuan Pendidikan Dasar Swasta Kabupaten Sekadau	
5.1.4.09.10.	Satuan Pendidikan Dasar Swasta Kabupaten Melawi	
5.1.4.09.11.	Satuan Pendidikan Dasar Swasta Kabupaten Kayong Utara	
5.1.4.09.12.	Satuan Pendidikan Dasar Swasta Kabupaten Kubu Raya	
5.1.4.09.13.	Satuan Pendidikan Dasar Swasta Kota Pontianak	
5.1.4.09.14.	Satuan Pendidikan Dasar Swasta Kota Singkawang	
5.1.4.09.15.	Dana Cadangan BOS	
5.1.4.09.16.	dst....	
5.1.4.10.	Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Menengah Swasta	
5.1.4.10.01	Satuan Pendidikan Menengah Swasta Kabupaten Sambas	
5.1.4.10.02.	Satuan Pendidikan Menengah Swasta Kabupaten Mempawah	
5.1.4.10.03.	Satuan Pendidikan Menengah Swasta Kabupaten Sanggau	
5.1.4.10.04.	Satuan Pendidikan Menengah Swasta Kabupaten Ketapang	
5.1.4.10.05.	Satuan Pendidikan Menengah Swasta Kabupaten Sintang	
5.1.4.10.06.	Satuan Pendidikan Menengah Swasta Kabupaten Kapuas Hulu	
5.1.4.10.07.	Satuan Pendidikan Menengah Swasta Kabupaten Bengkayang	
5.1.4.10.08.	Satuan Pendidikan Menengah Swasta Kabupaten Landak	
5.1.4.10.09.	Satuan Pendidikan Menengah Swasta Kabupaten Sekadau	
5.1.4.10.10.	Satuan Pendidikan Menengah Swasta Kabupaten Melawi	
5.1.4.10.11.	Satuan Pendidikan Menengah Swasta Kabupaten Kayong Utara	
5.1.4.10.12.	Satuan Pendidikan Menengah Swasta Kabupaten Kubu Raya	
5.1.4.10.13.	Satuan Pendidikan Menengah Swasta Kota Pontianak	
5.1.4.10.14.	Satuan Pendidikan Menengah Swasta Kota Singkawang	
5.1.4.10.15.	Dana Cadangan BOS	
5.1.4.10.16.	dst....	
5.1.4.11.	Belanja Hibah kepada Partai Politik	
5.1.4.11.01.	Belanja Hibah kepada Partai Politik	
5.1.4.11.02.	dst.....	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	
5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga/Komisi Mitra Pemerintah	
5.1.5.01.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga/Organisasi/Kegiatan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
5.1.5.01.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga/Organisasi Profesi	
5.1.5.01.04.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga/Organisasi/Kegiatan Keagamaan dan Seni Budaya	
5.1.5.01.05.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga/Kegiatan/Organisasi Wanita	
5.1.5.01.06.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga/Organisasi/Kegiatan Kemasyarakatan	
5.1.5.01.07.	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	
5.1.5.01.08.	dst....	
5.1.5.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	
5.1.5.02.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat	
5.1.5.02.02.	dst....	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat	
5.1.5.03.02.	dst....	
5.1.5.04.	Bantuan Belanja Sosial kepada Mahasiswa dan Pelajar	
5.1.5.04.01.	Bantuan Belanja Sosial kepada Mahasiswa dan Pelajar	
5.1.5.04.02.	dst....	
5.1.5.05.	dst....	
5.1.5.05.01.	dst....	
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
5.1.6.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi	
5.1.6.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi.....	
5.1.6.01.02.	dst.....	
5.1.6.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.02.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Sambas	
5.1.6.02.02.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Mempawah	
5.1.6.02.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Sanggau	
5.1.6.02.04.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Ketapang	
5.1.6.02.05.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Sintang	
5.1.6.02.06.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Kapuas Hulu	
5.1.6.02.07.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Bengkayang	
5.1.6.02.08.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Landak	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.1.6.02.09.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Sekadau	
5.1.6.02.11.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Kayong Utara	
5.1.6.02.12.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten Kubu Raya	
5.1.6.02.13.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Pontianak	
5.1.6.02.14.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kota Singkawang	
5.1.6.02.15.	dst.....	
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.03.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.03.02.	dst.....	
5.1.6.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.04.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten Sambas	
5.1.6.04.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten Mempawah	
5.1.6.04.03.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten Sanggau	
5.1.6.04.04.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten Ketapang	
5.1.6.04.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten Sintang	
5.1.6.04.06.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten Kapuas Hulu	
5.1.6.04.07.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten Bengkayang	
5.1.6.04.08.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten Landak	
5.1.6.04.09.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten Sekadau	
5.1.6.04.10.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten Melawi	
5.1.6.04.11.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten Kayong Utara	
5.1.6.04.12.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten Kubu Raya	
5.1.6.04.13.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kota Pontianak	
5.1.6.04.14.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kota Singkawang	
5.1.6.04.15.	dst.....	
5.1.6.05.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa	
5.1.6.05.01.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa .	
5.1.6.05.02.	dst.....	
5.1.6.06.	Belanja Bagi Hasil Lain - Lain Pendapatan Daerah kepada Kabupaten/Kota	
5.1.6.06.01	Belanja Bagi Hasil Partisipasi Pihak Ketiga kepada Kabupaten Sambas	
5.1.6.06.02	Belanja Bagi Hasil Partisipasi Pihak Ketiga kepada Kabupaten Mempawah	
5.1.6.06.03	Belanja Bagi Hasil Partisipasi Pihak Ketiga kepada Kabupaten Sanggau	
5.1.6.06.04	Belanja Bagi Hasil Partisipasi Pihak Ketiga kepada Kabupaten Ketapang	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.1.6.06.05	Belanja Bagi Hasil Partisipasi Pihak Ketiga kepada Kabupaten Bintang	
5.1.6.06.06	Belanja Bagi Hasil Partisipasi Pihak Ketiga kepada Kabupaten Kapuas Hulu	
5.1.6.06.07	Belanja Bagi Hasil Partisipasi Pihak Ketiga kepada Kabupaten Bengkayang	
5.1.6.06.08	Belanja Bagi Hasil Partisipasi Pihak Ketiga kepada Kabupaten Landak	
5.1.6.06.09	Belanja Bagi Hasil Partisipasi Pihak Ketiga kepada Kabupaten Sekadau	
5.1.6.06.10	Belanja Bagi Hasil Partisipasi Pihak Ketiga kepada Kabupaten Melawi	
5.1.6.06.11	Belanja Bagi Hasil Partisipasi Pihak Ketiga kepada Kabupaten Kayong Utara	
5.1.6.06.12	Belanja Bagi Hasil Partisipasi Pihak Ketiga kepada Kabupaten Kubu Raya	
5.1.6.06.13	Belanja Bagi Hasil Partisipasi Pihak Ketiga kepada Kabupaten Kota Pontianak	
5.1.6.06.14	Belanja Bagi Hasil Partisipasi Pihak Ketiga kepada Kota Singkawang	
5.1.6.06.15.	dst.....	
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	
5.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	
5.1.7.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi.....	
5.1.7.01.02.	dst.....	
5.1.7.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
5.1.7.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sambas	
5.1.7.02.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Mempawah	
5.1.7.02.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sanggau	
5.1.7.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bintang	
5.1.7.02.06.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kapuas Hulu	
5.1.7.02.07.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Bengkayang	
5.1.7.02.08.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Landak	
5.1.7.02.09.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Sekadau	
5.1.7.02.10.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Melawi	
5.1.7.02.11.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kayong Utara	
5.1.7.02.12.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kubu Raya	
5.1.7.02.13.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Pontianak	
5.1.7.02.14.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Singkawang	
5.1.7.02.15.	dst.....	
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
5.1.7.03.02.	dst.....	
5.1.7.04.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa lainnya	
5.1.7.04.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi ,	
5.1.7.04.02.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota,	
5.1.7.04.03.	dst.....	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	
5.1.8.01.02.	dst.....	
5.2.	BELANJA LANGSUNG	
5.2.1.	Belanja Pegawai	
5.2.1.01.	Honorarium PNSD	
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Digunakan untuk biaya honorarium bagi PNSD yang mendapat tugas sebagai panitia pelaksanaan kegiatan
5.2.1.01.02.	Honorarium Pengelola UKPBJ	
5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Honorarium Panitia yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Honorarium Pejabat yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	PA/KPA, BUD/Kuasa BUD, PPK, PPK Pembantu, Pembantu PPK, Pembantu PPK Pembantu, PPTK Bendahara, Bendahara Pembantu, Pembantu Bendahara, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu
5.2.1.01.07.	Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah	Pengelola, Penatausahaan dan Pengurus Barang pengelola, pembantu pengurus barang pengelola, pengurus barang pengguna
5.2.1.01.09.	Honorarium Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Penyusun Kontrak, Petugas Survey, dan Tim Ahli
5.2.1.02.	Honorarium Non PNSD	
5.2.1.02.01.	Honorarium Tenaga Kontrak/Tenaga Tidak tetap	termasuk bantuan kelangkaan profesi
5.2.1.02.02.	Tunjangan Khusus Bantuan Polisi Pamong Praja	
5.2.1.02.03.	Honorarium Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	Penyusun Kontrak, Petugas Survey, dan Tim Ahli
5.2.1.03.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	
5.2.1.03.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	
5.2.1.04	Jasa Pelayanan Kesehatan	
5.2.1.04.01	Jasa Pelayanan Kesehatan	
5.2.1.04.02	Jasa Dokter Jaga/Petugas Jaga	
5.2.1.04.03	Jasa Pelayanan Laboratorium Kesehatan	
5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	
5.2.2.01.02.	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	
5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	
5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Belanja untuk Genset dan Kegiatan 01.14 (Perjalanan Dinas)

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.2.2.01.07.	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	
5.2.2.01.08.	Belanja Pengisian Tabung Gas/Oxygen	
5.2.2.01.09.	Belanja Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	
5.2.2.01.10.	Belanja Obat-Obatan	
5.2.2.01.11.	Belanja Bahan Pakai Habis Perlengkapan Medis	
5.2.2.01.12.	Belanja Hadiah/Cinderamata/Karangan Bunga	Belanja hadiah yang berupa barang (bukan berupa Uang)
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	
5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	
5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	
5.2.2.02.03.	Belanja Bibit Ternak/Ikan	
5.2.2.02.04.	Belanja Bahan Kimia	
5.2.2.02.05.	Belanja Perlengkapan/Peralatan	
5.2.2.02.06.	Belanja Bahan Percontohan/Praktek	
5.2.2.02.07.	Belanja Bahan Makanan Dan Minuman	
5.2.2.02.08.	Belanja Buku/Materi/Modul	
5.2.2.02.09.	Belanja Bahan Dokumentasi/Dekorasi	
5.2.2.02.10.	Belanja Suku Cadang Peralatan/Mesin	
5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Tenun	
5.2.2.02.12.	Belanja Umbul-Umbul/Bendera	
5.2.2.02.13.	Belanja Kelengkapan Komputer	Belanja yang tidak bersifat modal dengan memperhatikan nilai minimum kapitalisasi aset
5.2.2.02.14.	Belanja Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	
5.2.2.02.15.	Belanja Pupuk	
5.2.2.02.16.	Belanja Spanduk/Baliho/Banner	
5.2.2.02.17.	Belanja Bahan Material Perbengkelan	
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	
5.2.2.03.01.	Belanja Telepon	
5.2.2.03.02.	Belanja Air	
5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	
5.2.2.03.04.	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	
5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar Dan Majalah	
5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Tv Kabel	
5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	Khusus untuk Belanja Pembelian Cek, Belanja Jasa Pulsa dan Belanja Jasa Kliring
5.2.2.03.10.	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5.2.2.03.11.	Belanja Retribusi Kebersihan	
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Publikasi/Iklan/Dokumentasi	
5.2.2.03.13.	Belanja Pemulangan/Penguburan Pasien Kurang Mampu	
5.2.2.03.14.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	Jasa yang diberikan kepada petugas kesehatan yang melaksanakan kegiatan
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Transportasi / Akomodasi	
5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Dekorasi	
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Pengujian	
5.2.2.03.19.	Belanja Jasa Perizinan	
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Kebersihan/Cleaning Servis	
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Teknis Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan	
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Updating Data	
5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Perawatan Dan Pengobatan Diluar Tanggungan Jaminan Kesehatan	
5.2.2.03.24.	Belanja Pemberian Santunan kepada PNSD/Ahli Waris PNSD yang Meninggal Dunia	
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Laundry	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.2.2.03.27.	Belanja Operasional Pelayanan Kesehatan Jamkesmas	
5.2.2.03.28.	Belanja Iuran Sekretariat Bersama	
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Keamanan	
5.2.2.03.30.	Belanja Aplikasi	Untuk pembelian aplikasi berbayar
5.2.2.03.31.	Belanja Colocation Server	Untuk penitipan/penyimpanan server di data center
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	
5.2.2.04.01.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	
5.2.2.04.03.	Belanja Premi Asuransi Jiwa	
5.2.2.04.04.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS)	
5.2.2.04.05.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	
5.2.2.04.06.	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM)	
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
5.2.2.05.01.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan	Termasuk Jasa Service, Penggantian Suku cadang, Pelumas dan Sejenisnya
5.2.2.05.02.	Belanja Bahan Bakar Kendaraan	
5.2.2.05.03.	Belanja Jasa KIR	
5.2.2.05.04.	Belanja Pajak/Administrasi Kendaraan Bermotor	Termasuk STNK
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak/Administrasi Kendaraan Di Atas Air	
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	
5.2.2.06.03.	Belanja Jilid	
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Lahan	
5.2.2.07.01.	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	
5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Penginapan	
5.2.2.07.03.	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	
5.2.2.07.04.	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	
5.2.2.07.05.	Belanja Sewa Kandang	
5.2.2.07.06.	Belanja Sewa Stand Pameran	termasuk sewa perlengkapan stand
5.2.2.07.07.	Belanja Sewa Lahan	
5.2.2.07.08.	Belanja Sewa Sarana/Prasarana Olahraga	
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	
5.2.2.08.02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	
5.2.2.08.03.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	
5.2.2.09.01.	Belanja Sewa Eskavator	
5.2.2.09.02.	Belanja Sewa Bulldoser	
5.2.2.09.03.	Belanja Sewa Traktor	
5.2.2.09.04.	Belanja Sewa Stoom Wals	
5.2.2.09.05.	Belanja Sewa Dump Truk	
5.2.2.09.06.	Belanja Sewa Crane	
5.2.2.09.07.	Belanja Sewa Kendaraan Penyapu Jalan	
5.2.2.09.08.	Belanja Sewa Mesin Pengolah Semen	
5.2.2.09.09.	Belanja Sewa Jack Hammer (Jalan)	
5.2.2.09.10.	Belanja Sewa Compresor (Jalan)	
5.2.2.09.11.	Belanja Sewa Tandem Vibratory Roller 2 Ton (Jalan)	
5.2.2.09.12.	Belanja Sewa Grass Cutter	
5.2.2.09.13.	Belanja Sewa Mesin Chainsaw	
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	
5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	
5.2.2.10.02.	Belanja Sewa Proyektor	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.2.2.10.03.	Belanja Sewa Generator	
5.2.2.10.04.	Belanja Sewa Tenda	
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	
5.2.2.10.06.	Belanja Sewa Peralatan Kesenian	
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Alat Gambar	
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Studio / Komunikasi	
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	termasuk sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga	
5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kesehatan	
5.2.2.10.12.	Belanja Sewa Tanaman Hias	
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	
5.2.2.11.01.	Belanja Makanan dan Minuman Harian	
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	
5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	
5.2.2.11.04.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Siswa/Mahasiswa	
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	termasuk belanja sepatu, ikat pinggang dan tanda pengenal lainnya
5.2.2.12.01.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	
5.2.2.12.02.	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	termasuk belanja Pakaian Dinas Tenaga Kontrak. PDH Khaki, PDH Kemeja Putih dengan celana/rok hitam atau gelap, PDH Batik, PDH Khusus
5.2.2.12.05.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	
5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian KORPRI	
5.2.2.12.08.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	
5.2.2.12.09.	Belanja Pakaian Olahraga	
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	
5.2.2.13.01.	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	
5.2.2.13.02.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	
5.2.2.14.02.	Belanja Pakaian Adat Daerah	
5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Khusus	termasuk belanja sepatu, ikat pinggang, ransel, topi dan tanda pengenal lainnya
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	
5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	
5.2.2.16.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
5.2.2.16.01.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	
5.2.2.16.02.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	
5.2.2.16.03.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	
5.2.2.16.04.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	
5.2.2.16.05.	Belanja Bantuan Ijin Belajar	
5.2.2.17.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
5.2.2.17.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	
5.2.2.17.02.	Belanja Sosialisasi	
5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
5.2.2.18.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
5.2.2.18.01.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	
5.2.2.18.02.	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Luar Daerah	
5.2.2.19.	Belanja Pemulangan Pegawai	
5.2.2.19.01.	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Dalam Daerah	
5.2.2.19.02.	Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah	
5.2.2.19.03.	Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	Belanja pemeliharaan yang sifatnya tidak menambah aset
5.2.2.20.01.	Belanja Pemeliharaan Jalan	
5.2.2.20.02.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	
5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan	
5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Mess/Asrama	
5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Mebelair	
5.2.2.20.07.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	
5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Komunikasi/Sistem Informasi	
5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Jabatan	
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	
5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	
5.2.2.20.12.	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Lahan/Taman/Halaman	Termasuk untuk Pengadaan Tanah Urugan
5.2.2.20.14.	Belanja Pemeliharaan Konstruksi Irigasi, Rawa, Sungai Dan Pantai	
5.2.2.20.15.	Belanja Pemeliharaan Barang Bernilai Sejarah	
5.2.2.20.16.	Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Khusus	
5.2.2.20.17.	Belanja Pemeliharaan Komputer/Printer	
5.2.2.20.18.	Belanja Pemeliharaan AC/Kipas Angin	
5.2.2.20.19.	Belanja Pemeliharaan Generator	
5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan Mesin Pompa Air	
5.2.2.20.21.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telepon	
5.2.2.20.22.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga	
5.2.2.20.23.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Studio	
5.2.2.20.24.	Belanja Pemeliharaan Gedung Pertemuan/Aula	
5.2.2.20.25.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Ibadah	
5.2.2.20.26.	Belanja Pemeliharaan Gudang	
5.2.2.20.27.	Belanja Pemeliharaan Sarana/Prasarana Olahraga	
5.2.2.20.28.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air/Bak Air/Menara Air	
5.2.2.20.29.	Belanja Pemeliharaan Pos Penjaga Keamanan	
5.2.2.20.30.	Belanja Pemeliharaan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan	
5.2.2.20.31.	Belanja Pemeliharaan Pagar	
5.2.2.20.32.	Belanja Pemeliharaan Plank Nama Kantor	
5.2.2.20.33.	Belanja Pemeliharaan Pintu Gerbang	
5.2.2.20.34.	Belanja Pemeliharaan Saluran Air/Parit	
5.2.2.20.35.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Bangunan Khusus/Gedung Khusus	
5.2.2.20.36.	Belanja Pemeliharaan Konstruksi Khusus	
5.2.2.20.37.	Belanja Pemeliharaan Sistem Informasi	
5.2.2.20.38.	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Khusus	
5.2.2.20.39.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan Di Air	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	
5.2.2.21.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	
5.2.2.21.02.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	
5.2.2.21.03.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	
5.2.2.21.04.	Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer	
5.2.2.22.	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	
5.2.2.22.01	Belanja Barang Dan Jasa Dana BOS	
5.2.2.23.	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pemerintah/Pemerintah Daerah Lain	
5.2.2.23.01.	Pengadaan Buku Pelajaran/Perpustakaan	
5.2.2.23.02.	Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah	
5.2.2.23.03.	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan	
5.2.2.23.04.	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	
5.2.2.23.05.	Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	
5.2.2.23.06.	Pengadaan Bahan Kimia	
5.2.2.23.07.	Pengadaan Obat dan Bahan Medis	
5.2.2.23.08.	Pengadaan Alat-Alat Olahraga	
5.2.2.23.09.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	
5.2.2.23.10.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
5.2.2.23.11.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	
5.2.2.23.12.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	
5.2.2.23.13.	Pengadaan Barang-Barang Seni Budaya	
5.2.2.23.14.	Pengadaan Barang-Barang Bernilai Sejarah	
5.2.2.23.15.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	
5.2.2.23.16.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	
5.2.2.23.17.	Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat/Laut dan Udara	
5.2.2.23.18.	Pengadaan Alat-Alat Bengkel dan Keterampilan	
5.2.2.23.19.	Pengadaan Sarana dan Prasaranan Studio dan Komunikasi	
5.2.2.23.20.	Pengadaan Jalan	
5.2.2.23.21.	Pengadaan Jembatan	
5.2.2.23.22.	Pengadaan Jaringan	
5.2.2.23.23.	Pengadaan Instalasi	
5.2.2.23.24.	Pengadaan Alat-Alat Berat	
5.2.2.23.25.	Pengadaan Konstruksi/Bangunan	
5.2.2.23.26.	Pengadaan Tanaman/Bibit Tanaman	
5.2.2.23.27.	Pengadaan Pupuk	
5.2.2.23.28.	Pengadaan Obat- Obatan Pertanian/Perkebunan	
5.2.2.23.29.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pertanian/Perkebunan	
5.2.2.23.30.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan	
5.2.2.23.31.	Pengadaan Hewan Ternak/Bibit Ternak	
5.2.2.23.32.	Pengadaan Pakan Ternak	
5.2.2.23.33.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Peternakan	
5.2.2.23.34.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan	
5.2.2.23.35.	Pengadaan Obat-Obatan Peternakan	
5.2.2.23.36.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Energi dan Sumber Daya Mineral	
5.2.2.23.37.	Pengadaan Ikan/Bibit Ikan	
5.2.2.23.38.	Pengadaan Pakan Ikan	
5.2.2.23.39.	Pengadaan Obat-Obatan Perikanan	
5.2.2.23.40.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kelautan dan Perikanan	
5.2.2.23.41.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	
5.2.2.23.42.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perindustrian dan Perdagangan	
5.2.2.23.43.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	
5.2.2.23.44.	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kewirausahaan	
5.2.2.23.45.	Pengadaan Bahan Bangunan	
5.2.2.23.46.	Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.2.2.23.47.	Belanja Kompensasi Bangunan dan Tanam Tumbuh	
5.2.2.23.48.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	
5.2.2.23.49.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kesenian	
5.2.2.23.50.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	
5.2.2.24.	Belanja Barang yang akan dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pemerintah/Pemerintah Daerah Lain	
5.2.2.24.01	Belanja Barang yang akan dijual Kepada Masyarakat	
5.2.2.24.02	Belanja Barang yang akan dijual Kepada Pihak Ketiga	
5.2.2.24.03	Belanja Barang yang akan dijual Kepada Pemerintah	
5.2.2.24.04	Belanja Barang yang akan dijual Kepada Pemerintah Daerah Lain	
5.2.2.25.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	
5.2.2.25.01	Belanja Beasiswa Kader Aparatur	
5.2.2.25.02	Belanja Beasiswa Pelajar SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri	
5.2.2.25.03	Belanja Uang Sekolah Anak Asuh	
5.2.2.26	Belanja Jasa PNSD dan Non PNSD	
5.2.2.26.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	
5.2.2.26.02	Belanja Jasa Kepanitiaan	
5.2.2.26.03	Belanja Jasa Penulisan makalah	
5.2.2.26.04	Belanja Jasa Kuasa hukum	
5.2.2.26.05	Uang Saku Peserta	
5.2.2.26.06	Insentif Guru Daerah Terpencil	
5.2.2.26.07	Belanja Jasa Tenaga Kerja/Upah Kerja	
5.2.2.26.08	Belanja Jasa Pengamanan	
5.2.2.26.09	Belanja Jasa Moderator/Pendamping Pengajar	
5.2.2.26.10	Belanja Jasa Notulen	
5.2.2.26.11	Belanja Jasa Rohaniawan	
5.2.2.26.12	Belanja Jasa Kesenian	
5.2.2.26.13	Belanja Jasa Pembawa acara	
5.2.2.26.14	Belanja Jasa Dirigen	
5.2.2.26.15	Belanja Jasa Pendampingan	
5.2.2.26.16	Belanja Jasa Boga	
5.2.2.26.17	Belanja Jasa Operator	
5.2.2.26.18	Belanja Jasa Pembaca Doa	
5.2.2.26.19	Belanja Jasa Penelitian	
5.2.2.26.20	Belanja Jasa Pembuatan Peta	
5.2.2.26.21	Belanja Jasa operasional Satpol PP	
5.2.2.27	Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
5.2.2.27.01	Belanja Hadiah	Uang yang diberikan sebagai hadiah Perlombaan dimana SKPD sebagai Panitia Penyelenggara
5.2.2.27.02	Insentif Siswa / Mahasiswa berprestasi	Uang yang diberikan sebagai penghargaan/ insentif atas prestasi yang dicapai dalam mengikuti lomba (Bukan sebagai Hadiah Perlombaan, misalnya insentif kepada Siswa/Mahasiswa Kalimantan Barat yang menjuarai Olimpiade matematika Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat)

KODE	URAIAN	KETERANGAN
5.2.2.27.03	Insentif Atlet / Pelatih berprestasi	Uang yang diberikan sebagai penghargaan/ insentif atas prestasi yang dicapai dalam mengikuti lomba (Bukan Hadiah Perlombaan, misalnya insentif kepada Atlet Kalimantan Barat yang menjuarai Pekan Olahraga Nasional/PON)
5.2.2.27.04	Insentif Masyarakat berprestasi	Uang yang diberikan sebagai penghargaan/ insentif atas prestasi yang dicapai dalam mengikuti lomba (Bukan Hadiah Perlombaan, misalnya insentif kepada Masyarakat Kalimantan Barat yang mendapatkan Penghargaan Kalpataru)
5.2.2.27.05	Insentif Guru berprestasi	Uang yang diberikan sebagai penghargaan/ insentif atas prestasi yang dicapai dalam bentuk biaya perjalanan ibadah
5.2.2.27.06	dst.....	
5.2.2.28	Belanja Barang dan Jasa BLUD	
5.2.2.28.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	
5.2.2.29	Belanja Bantuan Sosial Barang	
5.2.2.29.01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	
5.2.2.31	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	
5.2.2.31.01.	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	
5.2.3.	Belanja Modal	
5.2.3.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	
5.2.3.01.01.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.38 Belanja Modal Jasa Dan Administrasi Pengadaan Tanah
5.2.3.01.02.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	
5.2.3.01.03.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas	
5.2.3.01.04.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Poliklinik	
5.2.3.01.05.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Taman Kanak - Kanak	
5.2.3.01.06.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar	
5.2.3.01.07.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Umum Dan Kejuruan	
5.2.3.01.08.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Menengah Lanjutan Dan Kejuruan	
5.2.3.01.09.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Luar Biasa/Khusus	
5.2.3.01.10.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Pelatihan Dan Kursus	
5.2.3.01.11.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Sosial Pantu Asuhan	
5.2.3.01.12.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Sosial Pantu Jompo	
5.2.3.01.13.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Terminal	
5.2.3.01.14.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Dermaga	
5.2.3.01.15.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.2.3.01.16.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Rumah Potong Hewan	
5.2.3.01.17.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pelelangan Ikan	
5.2.3.01.18.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar	
5.2.3.01.19.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	
5.2.3.01.20.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Taman	
5.2.3.01.21.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pusat Hiburan Rakyat	
5.2.3.01.22.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Ibadah	
5.2.3.01.23.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Stadion Olahraga	
5.2.3.01.24.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perumahan	
5.2.3.01.25.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian	
5.2.3.01.26.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkebunan	
5.2.3.01.27.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perikanan	
5.2.3.01.28.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Peternakan	
5.2.3.01.29.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan	
5.2.3.01.30.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Pergudangan/Tempat Penimbunan Material Bahan Baku	
5.2.3.01.31.	Belanja Modal Pengadaan Tanah/Pembebasan Lahan	Termasuk Ganti Rugi Tanam Tumbuh
5.2.3.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	Untuk Belanja Modal
5.2.3.02.01.	Belanja Modal Pengadaan Traktor	Jasa dan Administrasi Pada
5.2.3.02.02.	Belanja Modal Pengadaan Buldozer	Kode Rekening Ini Disesuaikan
5.2.3.02.03.	Belanja Modal Pengadaan Stoom Wals	Dengan Pengelompokan Dalam
5.2.3.02.04.	Belanja Modal Pengadaan Eskavator	Neraca, Yaitu Pada Kode
5.2.3.02.05.	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk	Rekening 5.2.3.39 Belanja
5.2.3.02.06.	Belanja Modal Pengadaan Crane	Modal Jasa dan
5.2.3.02.07.	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Penyapu Jalan	Administrasi Pengadaan
5.2.3.02.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Semen	Kendaraan, Peralatan dan
5.2.3.02.09.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air	Mesin
5.2.3.02.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jembatan Timbang	
5.2.3.02.11.	Belanja Modal Pengadaan Jack Hammer (Jalan)	
5.2.3.02.12.	Belanja Modal Pengadaan Compressor (Jalan)	
5.2.3.02.13.	Belanja Modal Pengadaan Tandem Vibratory Roller (Jalan)	
5.2.3.02.14.	Belanja Modal Pengadaan Grass Cutter	
5.2.3.02.15.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Chainsaw	
5.2.3.02.16.	Belanja Modal Pengadaan Stamper	
5.2.3.02.17.	Belanja Modal Pengadaan Loader	
5.2.3.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	Untuk Belanja Modal Jasa dan
5.2.3.03.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan	Administrasi Pada Kode Rekening
5.2.3.03.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Jeep	Ini Disesuaikan Dengan
5.2.3.03.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	Pengelompokan Dalam Neraca,
5.2.3.03.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Bus	Yaitu Pada Kode Rekening
5.2.3.03.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	5.2.3.39 Belanja Modal Jasa
5.2.3.03.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Truck	dan Administrasi Pengadaan
5.2.3.03.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Tangki	Kendaraan, Peralatan dan
		Mesin.

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.2.3.03.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks	
5.2.3.03.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	
5.2.3.03.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	
5.2.3.03.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	
5.2.3.03.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor	
5.2.3.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.04.01.	Belanja Modal Pengadaan Gerobak	
5.2.3.04.02.	Belanja Modal Pengadaan Pedati/Delman/Dokar/Bendi/Cidomo/Andong	
5.2.3.04.03.	Belanja Modal Pengadaan Becak	
5.2.3.04.04.	Belanja Modal Pengadaan Sepeda	
5.2.3.04.05.	Belanja Modal Pengadaan Karavan	
5.2.3.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.05.01.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor	
5.2.3.05.02.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Feri	
5.2.3.05.03.	Belanja Modal Pengadaan Speed Boat	
5.2.3.05.04.	Belanja Modal Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel	
5.2.3.05.05.	Belanja Modal Pengadaan Hydro Foil	
5.2.3.05.06.	Belanja Modal Pengadaan Jet Foil	
5.2.3.05.07.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Tug Boat	
5.2.3.05.08.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Tanker	
5.2.3.05.09.	Belanja Modal Pengadaan Kapal Kargo	
5.2.3.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.06.01.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Layar	
5.2.3.06.02.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Sampan	
5.2.3.06.03.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Tongkang	
5.2.3.06.04.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet	
5.2.3.06.05.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Rakit	
5.2.3.06.06.	Belanja Modal Pengadaan Perahu Sekoci	
5.2.3.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.07.01.	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Kargo	
5.2.3.07.02.	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Penumpang	
5.2.3.07.03.	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Helikopter	
5.2.3.07.04.	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Pemadam Kebakaran	
5.2.3.07.05.	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Capung	
5.2.3.07.06.	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang Ampibi	
5.2.3.07.07.	Belanja Modal Pengadaan Pesawat Terbang Layang	
5.2.3.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Dan Keterampilan	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan
5.2.3.08.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Las	
5.2.3.08.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bubut	
5.2.3.08.03.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Dongkrak	
5.2.3.08.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	
5.2.3.08.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Tidak Bermesin	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
5.2.3.08.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel/Pertukangan	Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.08.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Keterampilan	
5.2.3.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian, Peternakan Dan Perikanan	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.09.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian/Peternakan/Perikanan	
5.2.3.09.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengering Gabah	
5.2.3.09.03.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bajak	
5.2.3.09.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Penetas	
5.2.3.09.05.	Belanja Modal Pengadaan Media Penyimpan Pertanian/Peternakan/Perikanan	
5.2.3.09.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan/Perikanan	
5.2.3.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.10.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik	
5.2.3.10.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	
5.2.3.10.03.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Stensil	
5.2.3.10.04.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy	
5.2.3.10.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak	
5.2.3.10.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid	
5.2.3.10.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas	
5.2.3.10.08.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	
5.2.3.10.09.	Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik	
5.2.3.10.10.	Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik /Manual	
5.2.3.10.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi Pegawai	
5.2.3.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor / Gedung Kantor	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.11.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Gambar	
5.2.3.11.02.	Belanja Modal Pengadaan Almari	
5.2.3.11.03.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	
5.2.3.11.04.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	
5.2.3.11.05.	Belanja Modal Pengadaan White Board	
5.2.3.11.06.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	
5.2.3.11.07.	Belanja Modal Pengadaan Generator	
5.2.3.11.08.	Belanja Modal Pengadaan Ac/ Kipas Angin	
5.2.3.11.09.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Olah Raga	
5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	
5.2.3.11.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Toilet	
5.2.3.11.12.	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	
5.2.3.11.13.	Belanja Modal Pengadaan Standing Banner	
5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Teralis	
5.2.3.11.15.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Pemadam Kebakaran	Alat dan Pakaian Pemadam Kebakaran beserta kelengkapannya
5.2.3.11.16.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	
5.2.3.11.17.	Belanja Modal Pengadaan Tangga	
5.2.3.11.18.	Belanja Modal Pengadaan Penangkal Petir	
5.2.3.11.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Penanggulangan Bencana	
5.2.3.11.20.	Belanja Modal Pengadaan Podium	
5.2.3.11.21.	Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan/Air Freshener	
5.2.3.11.22.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera/Tiang Umbul - Umbul	
5.2.3.11.23.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	
5.2.3.11.24.	Belanja Modal Pengadaan Troly	
5.2.3.12.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca Yaitu Pada Kode
5.2.3.12.01.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	
5.2.3.12.02.	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	
5.2.3.12.03.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.2.3.12.04.	Belanja Modal Pengadaan Printer	Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.12.05.	Belanja Modal Pengadaan Scaner	
5.2.3.12.06.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	
5.2.3.12.07.	Belanja Modal Pengadaan CPU	
5.2.3.12.08.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	
5.2.3.12.09.	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	
5.2.3.12.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	
5.2.3.13.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	
5.2.3.13.01.	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	
5.2.3.13.02.	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	
5.2.3.13.03.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	
5.2.3.13.04.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	
5.2.3.13.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	
5.2.3.13.06.	Belanja Modal Pengadaan Meja Tunggu	
5.2.3.13.07.	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Sekolah	
5.2.3.13.08.	Belanja Modal Pengadaan Rak	
5.2.3.14.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.14.01.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian	
5.2.3.14.02.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur / Tempat Tidur Bayi dan Balita	
5.2.3.14.03.	Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Tamu	
5.2.3.14.04.	Belanja Modal Pengadaan Meja Makan	
5.2.3.14.05.	Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan	
5.2.3.14.06.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Hias	
5.2.3.14.07.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Buku	
5.2.3.14.08.	Belanja Modal Pengadaan Rempel	
5.2.3.14.09.	Belanja Modal Pengadaan Sarana Bermain Anak-anak	
5.2.3.14.10.	Belanja Modal Pengadaan Sarana Kebutuhan Khusus	
5.2.3.15.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.15.01.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Tempat Tidur	
5.2.3.15.02.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	
5.2.3.15.03.	Belanja Modal Pengadaan Kompor	
5.2.3.15.04.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan	
5.2.3.15.05.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	
5.2.3.15.06.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	
5.2.3.15.07.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	
5.2.3.15.08.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dapur	
5.2.3.15.09.	Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker	
5.2.3.15.10.	Belanja Modal Pengadaan Drum/Tangki/Fiber	
5.2.3.15.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Potong Rumput	
5.2.3.16.	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan
5.2.3.16.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	
5.2.3.16.02.	Belanja Modal Pengadaan Gordin	
5.2.3.16.03.	Belanja Modal Pengadaan Lukisan	
5.2.3.16.04.	Belanja Modal Pengadaan Foto-Foto	
5.2.3.16.05.	Belanja Modal Pengadaan Karpet / Permadani	
5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja
5.2.3.17.01.	Belanja Modal Pengadaan Kamera	
5.2.3.17.02.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	
5.2.3.17.03.	Belanja Modal Pengadaan Proyektor	
5.2.3.17.04.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	
5.2.3.17.05.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesenian	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.2.3.17.06.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rekaman	Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.17.07.	Belanja Modal Pengadaan Televisi Dan Kelengkapannya	
5.2.3.17.08.	Belanja Modal Pengadaan Tape/DVD Player	
5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan CCTV dan Kelengkapannya	
5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.18.01.	Belanja Modal Pengadaan Telepon	
5.2.3.18.02.	Belanja Modal Pengadaan Faximili	
5.2.3.18.03.	Belanja Modal Pengadaan Radio SSB	
5.2.3.18.04.	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	
5.2.3.18.05.	Belanja Modal Pengadaan Radio VHF	
5.2.3.18.06.	Belanja Modal Pengadaan Radio UHF	
5.2.3.18.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi	
5.2.3.18.08.	Belanja Modal Pengadaan Airphone	
5.2.3.18.09.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Internet	
5.2.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.19.01.	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	
5.2.3.19.02.	Belanja Modal Pengadaan Teodolite	
5.2.3.19.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Emisi	
5.2.3.19.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat Gps	
5.2.3.19.05.	Belanja Modal Pengadaan Kompas/Peralatan Navigasi	
5.2.3.19.06.	Belanja Modal Pengadaan Barometer	
5.2.3.19.07.	Belanja Modal Pengadaan Seismograph	
5.2.3.19.08.	Belanja Modal Pengadaan Ultrasonograph	
5.2.3.19.09.	Belanja Modal Pengadaan Ecosunder	
5.2.3.19.10.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kemetrolagian	
5.2.3.19.11.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Survey	
5.2.3.19.12.	Belanja Modal Pengadaan Thermohyrometer	
5.2.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.20.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	
5.2.3.20.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Gigi	
5.2.3.20.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran THT	
5.2.3.20.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Mata	
5.2.3.20.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	
5.2.3.20.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak	
5.2.3.20.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	
5.2.3.20.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	
5.2.3.20.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kardiologi	
5.2.3.20.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Neurologi	
5.2.3.20.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Orthopedi	
5.2.3.20.12.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Hewan	
5.2.3.20.13.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Farmasi	
5.2.3.20.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyakit Dalam/Internis	
5.2.3.20.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi	
5.2.3.20.16.	Belanja Modal Pengadaan Suku Cadang Alat-Alat Kedokteran	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.2.3.21.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.21.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi	
5.2.3.21.02.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi	
5.2.3.21.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	
5.2.3.21.04.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Pertanian	
5.2.3.21.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan	
5.2.3.21.06.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perkebunan	
5.2.3.21.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Perikanan	
5.2.3.21.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bahasa	
5.2.3.21.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	
5.2.3.21.10.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Uji Mutu Konstruksi	
5.2.3.21.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Uji Mutu Lingkungan	
5.2.3.21.13.	Belanja Modal Pengadaan Suku Cadang Alat-Alat Laboratorium	
5.2.3.21.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Laboratorium Kesehatan	
5.2.3.22.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.41 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi
5.2.3.22.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	
5.2.3.22.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Fly Over	
5.2.3.22.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Under Pass	
5.2.3.22.04.	Belanja Modal Pengadaan Tanah/Pembebasan Lahan	
5.2.3.23.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.41 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi
5.2.3.23.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Gantung	
5.2.3.23.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Ponton	
5.2.3.23.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang	
5.2.3.23.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	
5.2.3.23.05.	Belanja Modal Pengadaan Tanah/Pembebasan Lahan	Termasuk Ganti Rugi Tanam Tumbuh
5.2.3.24.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.41 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi
5.2.3.24.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bendungan	
5.2.3.24.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Waduk	
5.2.3.24.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan	
5.2.3.24.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Bawah Tanah	
5.2.3.24.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	
5.2.3.24.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	
5.2.3.24.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Reservoir	
5.2.3.24.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pintu Air	
5.2.3.24.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Dermaga	
5.2.3.24.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Turap	
5.2.3.24.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Pembuangan Air Limbah	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.2.3.24.12.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pengamanan Pantai	
5.2.3.24.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Perkuatan Tebing	
5.2.3.24.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air/Parit	
5.2.3.24.15.	Belanja Modal Pengadaan Tanah/Pembebasan Lahan	Termasuk Ganti Rugi Tanam Tumbuh
5.2.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.41 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi
5.2.3.25.01.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan	
5.2.3.25.02.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman	
5.2.3.25.03.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerang Hutan Kota	
5.2.3.25.04.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerang Jalan Lingkungan Kantor	
5.2.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, Jaringan Air dan Gas	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.41 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi
5.2.3.26.01.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	
5.2.3.26.02.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon	
5.2.3.26.03.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Jaringan Air	
5.2.3.26.04.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas	
5.2.3.26.05.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Instalasi Listrik, Telepon, Jaringan Air Dan Gas	
5.2.3.26.06.	Belanja Modal Pengadaan Sumur Bor	
5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.40 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Gedung dan Bangunan
5.2.3.27.01.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	
5.2.3.27.02.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Jabatan	
5.2.3.27.03.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas/Mess/Asrama	
5.2.3.27.04.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	
5.2.3.27.05.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah	
5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Monumen	
5.2.3.27.07.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan	
5.2.3.27.08.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pendukung Bangunan Gedung.	
5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bak Air/Menara Air	
5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Terminal	
5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Jembatan Timbang	
5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan Taman	
5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Bangunan Khusus	
5.2.3.27.14.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Fasilitas Umum	
5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kandang	
5.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pertemuan/Aula	
5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Tempat Ibadah	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.2.3.27.18.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pos Penjaga Keamanan	
5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Sarana/Prasarana Olahraga	
5.2.3.27.20.	Belanja Modal Pengadaan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan	
5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Pagar	
5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Plank Nama Kantor	
5.2.3.27.23.	Belanja Modal Pengadaan Pintu Gerbang	
5.2.3.27.24.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan Kantor	
5.2.3.27.25.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Lingkungan Kantor	
5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Saluran Air/Parit Lingkungan Kantor	
5.2.3.27.27.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah	
5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	Untuk Belanja Modal
5.2.3.28.01.	Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika	Jasa dan Administrasi Pada
5.2.3.28.02.	Belanja Modal Pengadaan Buku Fisika	Kode Rekening Ini Disesuaikan
5.2.3.28.03.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia	Dengan Pengelompokan Dalam
5.2.3.28.04.	Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi	Neraca, Yaitu Pada Kode
5.2.3.28.05.	Belanja Modal Pengadaan Buku Biografi	Belanja Modal Jasa dan
5.2.3.28.06.	Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi	Administrasi Pengadaan Aset
5.2.3.28.07.	Belanja Modal Pengadaan Buku Astronomi	tetap Lainnya
5.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Buku Arkeologi	
5.2.3.28.09.	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa Dan Sastra	
5.2.3.28.10.	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	
5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah	
5.2.3.28.12.	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni Dan Budaya	
5.2.3.28.13.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	
5.2.3.28.14.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial	
5.2.3.28.15.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik Dan Ketatanegaraan	
5.2.3.28.16.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	
5.2.3.28.17.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia	
5.2.3.28.18.	Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa	
5.2.3.28.19.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi Dan Keuangan	
5.2.3.28.20.	Belanja Modal Pengadaan Buku Industri Dan Perdagangan	
5.2.3.28.21.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	
5.2.3.28.22.	Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah	
5.2.3.28.23.	Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala	
5.2.3.28.24.	Belanja Modal Pengadaan Mikrofilm	
5.2.3.28.25.	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe	
5.2.3.28.26.	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu-Ilmu Kesehatan	
5.2.3.28.27.	Belanja Modal Pengadaan Buku Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan	
5.2.3.28.28.	Belanja Modal Pengadaan Buku Peternakan Dan Perikanan	
5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Bernilai Sejarah	Untuk Belanja Modal
5.2.3.29.01.	Belanja Modal Pengadaan Lukisan/Foto	Jasa dan Administrasi Pada
5.2.3.29.02.	Belanja Modal Pengadaan Patung	Kode Rekening Ini Disesuaikan
5.2.3.29.03.	Belanja Modal Pengadaan Ukiran	Dengan Pengelompokan Dalam
5.2.3.29.04.	Belanja Modal Pengadaan Pahatan/Tempa	Neraca, Yaitu Pada Kode
5.2.3.29.05.	Belanja Modal Pengadaan Batu Alam	Rekening 5.2.3.42 Belanja
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Maket/Miniatur/Diorama	Modal Jasa dan
		Administrasi Pengadaan Aset
		tetap Lainnya

KODE	URAIAN	KETERANGAN
5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Barang Antik Dan Bernilai Sejarah	
5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Tradisional	
5.2.3.29.09.	Belanja Modal Pengadaan Pakaian Adat/ Tradisional dan Kelengkapan Lainnya	
5.2.3.30.	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.42 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Aset tetap Lainnya
5.2.3.30.01.	Belanja Modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang	
5.2.3.30.02.	Belanja Modal Pengadaan Ternak	
5.2.3.30.03.	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	
5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.31.01.	Belanja Modal Pengadaan Senjata Api	
5.2.3.31.02.	Belanja Modal Pengadaan Radar	
5.2.3.31.03.	Belanja Modal Pengadaan Mobil Water Canon	
5.2.3.31.04.	Belanja Modal Pengadaan Borgol	
5.2.3.31.05.	Belanja Modal Pengadaan Sangkur/Bayonet	
5.2.3.31.06.	Belanja Modal Pengadaan Perisai/Tameng	
5.2.3.31.07.	Belanja Modal Pengadaan Detektor Logam	
5.2.3.31.08.	Belanja Modal Pengadaan Rompi Anti Peluru	
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Pentungan	
5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Helm	
5.2.3.31.11.	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene	
5.2.3.31.12.	Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter	
5.2.3.31.13.	Belanja Modal Pengadaan Sarung Pistol	
5.2.3.31.14.	Belanja Modal Pengadaan Peluru Senpi / Gas	
5.2.3.31.15.	Belanja Modal Pengadaan Shock Gun	
5.2.3.31.16.	Belanja Modal Pengadaan Teropong	
5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pendukung Rumah Sakit	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.39 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.32.01.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Incenerator	
5.2.3.32.02.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Jarum	
5.2.3.32.03.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Sterilisasi	
5.2.3.33.	Belanja Modal Sistem Informasi	
5.2.3.33.01.	Belanja Modal Sistem Informasi	
5.2.3.33.02.	Belanja Modal Pengembangan Sistem Informasi	
5.2.3.33.03.	Belanja Modal Kelompok Kerja (Pokja) ULP	
5.2.3.33.04.	Belanja Modal Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	
5.2.3.33.05.	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	
5.2.3.33.06.	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	
5.2.3.33.07.	Belanja Modal ATK/Dokumen/Administrasi	
5.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Kelengkapan Jalan	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.41 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan
5.2.3.34.01.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu lintas Jalan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
		Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi
5.2.3.35.	Belanja Modal Dana BOS	
5.2.3.35.02.	Belanja Modal Tanah Dana BOS	
5.2.3.35.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS	
5.2.3.35.04.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS	
5.2.3.35.05.	Belanja Modal Jalan Jaringan Irigasi Dana BOS	
5.2.3.35.06.	Belanja Modal Aset tetap lainnya Dana BOS	
5.2.3.36.	Belanja Modal Peningkatan Gedung dan Bangunan	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.43 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Peningkatan Gedung dan Bangunan
5.2.3.36.01.	Belanja Modal Peningkatan Rumah Jabatan	
5.2.3.36.02.	Belanja Modal Peningkatan Rumah Dinas	
5.2.3.36.03.	Belanja Modal Peningkatan Mess/Asrama	
5.2.3.36.04.	Belanja Modal Peningkatan Gedung Kantor	
5.2.3.36.05.	Belanja Modal Peningkatan Gedung Pertemuan/Aula	
5.2.3.36.06.	Belanja Modal Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	
5.2.3.36.07.	Belanja Modal Peningkatan Gudang	
5.2.3.36.08.	Belanja Modal Peningkatan Sarana/Prasarana Olahraga	
5.2.3.36.09.	Belanja Modal Peningkatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Konstruksi Khusus	
5.2.3.36.10.	Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Rumah Jabatan	
5.2.3.36.11.	Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	
5.2.3.36.12.	Peningkatan Pos Penjaga Keamanan Kantor/Rumah Jabatan	
5.2.3.36.13.	Peningkatan Garasi/Tempat Parkir Kendaraan	
5.2.3.36.14.	Peningkatan Pagar Kantor	
5.2.3.36.15.	Peningkatan Plank Nama Kantor	
5.2.3.36.16.	Peningkatan Pintu Gerbang Kantor	
5.2.3.36.17.	Peningkatan Jalan/Jembatan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan	
5.2.3.36.18.	Peningkatan Bak Air/Menara Air	
5.2.3.36.19.	Peningkatan Saluran Air Lingkungan Gedung Dan Bangunan	
5.2.3.36.20.	Belanja Modal Peningkatan Gedung Sekolah	
5.2.3.37.	Belanja Modal Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi	a. Untuk belanja Rehabilitasi/Peningkatan bukan yang berada di Lingkungan Gedung dan Bangunan
5.2.3.37.01.	Belanja Modal Peningkatan Jalan	
5.2.3.37.02.	Belanja Modal Peningkatan Jembatan	
5.2.3.37.03.	Belanja Modal Peningkatan Irigasi	
5.2.3.37.04.	Belanja Modal Peningkatan Jaringan	
5.2.3.37.05.	Belanja Modal Peningkatan Instalasi	
		b. Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.44 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan
5.2.3.38	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Tanah	Disesuaikan dengan Pengelompokan dalam Neraca yaitu belanja Modal Administrasi untuk rekening 52301
5.2.3.38.01.	Belanja Modal Panitia Pengadaan Tanah	
5.2.3.38.02.	Belanja Modal Jasa Lembaga / Tim Penilai Harga Tanah	
5.2.3.38.03.	Belanja Modal Kelompok Kerja (Pokja) ULP	
5.2.3.38.04.	Belanja Modal Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	
5.2.3.38.05.	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN	
5.2.3.38.06.	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
5.2.3.38.07.	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah		
5.2.3.38.08.	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah		
5.2.3.38.09.	Belanja Administrasi Sidang		
5.2.3.38.10.	Belanja Modal ATK/Dokumen/Administrasi		
5.2.3.38.11.	Belanja Modal Makanan dan Minuman Pengadaan Tanah		
5.2.3.38.12.	Belanja Modal Sewa Tempat dan Peralatan		
5.2.3.38.13.	Belanja Modal Jasa Iklan dan Publikasi		
5.2.3.38.14.	Belanja Modal Perjalanan dinas dalam daerah		
5.2.3.38.15.	Belanja Modal Perjalanan dinas luar daerah		
5.2.3.39.	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Kendaraan, Peralatan dan Mesin		Disesuaikan dengan Pengelompokan dalam Neraca yaitu belanja Modal Administrasi untuk rekening 52302, 52303, 52304, 52305, 52306, 52307, 52308, 52309, 52310, 52311, 52312, 52313, 52314, 52315, 52316, 52317, 52318, 52319, 52320, 52321, 52331, 52332.
5.2.3.39.01.	Belanja Modal Kelompok Kerja (Pokja) ULP		
5.2.3.39.02.	Belanja Modal Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
5.2.3.39.03.	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		
5.2.3.39.04.	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
5.2.3.39.05.	Belanja Modal Tenaga Kerja Pemasangan Peralatan dan Mesin		
5.2.3.39.06.	Belanja Modal ATK/Dokumen/Administrasi		
5.2.3.39.07.	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan		
5.2.3.39.08.	Belanja Modal Jasa Paket/Pengiriman		
5.2.3.39.09.	Belanja modal Sewa Kendaraan		
5.2.3.39.10.	Belanja Modal Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
5.2.3.39.11.	Belanja Modal Perjalanan Dinas Luar Daerah		
5.2.3.40.	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Gedung dan Bangunan	Disesuaikan dengan Pengelompokan dalam Neraca yaitu belanja Modal Administrasi untuk rekening 52327	
5.2.3.40.01.	Belanja Modal Kelompok Kerja (Pokja) ULP		
5.2.3.40.02.	Belanja Modal Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
5.2.3.40.03.	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		
5.2.3.40.04.	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
5.2.3.40.05.	Belanja Modal Konsultansi Perencanaan		
5.2.3.40.06.	Belanja Modal Konsultansi Pengawasan		
5.2.3.40.07.	Belanja Modal ATK/Dokumen/Administrasi		
5.2.3.40.08.	Belanja Modal Perijinan		
5.2.3.40.09.	Belanja Modal Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
5.2.3.40.10.	Belanja Modal Perjalanan Dinas Luar Daerah		
5.2.3.40.11.	Belanja modal Tenaga Ahli/Fasilitator	Swakelola Dana DAK Bidang Pendidika	
5.2.3.41.	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi	Disesuaikan dengan Pengelompokan dalam Neraca yaitu belanja Modal Administrasi untuk rekening 52322, 52323, 52324, 52325, 52326, 52334	
5.2.3.41.01.	Belanja Modal Panitia Pengadaan Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi		
5.2.3.41.02.	Belanja Modal Jasa Lembaga/Tim Penilai Harga Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi		
5.2.3.41.03.	Belanja Modal Kelompok Kerja (Pokja) ULP		
5.2.3.41.04.	Belanja Modal Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
5.2.3.41.05.	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		
5.2.3.41.06.	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		
5.2.3.41.07.	Belanja Modal Biaya Pengukuran Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi		
5.2.3.41.08.	Belanja Administrasi Sidang		
5.2.3.41.09.	Belanja Modal Konsultansi Perencanaan		
5.2.3.41.10.	Belanja Modal Konsultansi Pengawasan		
5.2.3.41.11.	Belanja Modal Makanan dan Minuman Pengadaan Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi		
5.2.3.41.12.	Belanja Modal Sewa Tempat dan Peralatan Pengadaan Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi		
5.2.3.41.13.	Belanja Modal Jasa Iklan dan Publikasi Pengadaan Jalan, Jembatan, Irigasi, Jaringan dan Instalasi		
5.2.3.41.14.	Belanja Modal ATK/Dokumen/Administrasi		
5.2.3.41.15.	Belanja Modal Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
5.2.3.41.16.	Belanja Modal Perjalanan Dinas Luar Daerah		

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.2.3.42.	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan Aset tetap Lainnya	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pengadaan seperti : Buku / Kepustakaan pada Perpustakaan, Barang Modal bercorak seni dan Budaya, Hewan Ternak, Peralatan Olah Raga dan sebagainya selain yang termasuk dalam kategori Pengadaan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan Jembatan Irigasi dan Jaringan Disesuaikan dengan Pengelompokan dalam Neraca yaitu belanja Modal Administrasi untuk rekening 52328, 52329, 52330.
5.2.3.42.01.	Belanja Modal Kelompok Kerja (Pokja) ULP	
5.2.3.42.02.	Belanja Modal Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	
5.2.3.42.03.	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	
5.2.3.42.04.	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	
5.2.3.42.05.	Belanja Modal ATK/Dokumen/Administrasi	
5.2.3.42.06.	Belanja Modal Jasa Paket/Pengiriman	
5.2.3.42.07.	Belanja Modal Sewa Kendaraan	
5.2.3.42.08.	Belanja Modal Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
5.2.3.42.09.	Belanja Modal Perjalanan Dinas Luar Daerah	
5.2.3.43.	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Peningkatan Gedung dan Bangunan	Belanja Modal Administrasi untuk rekening 52336
5.2.3.43.01.	Belanja Modal Kelompok Kerja (Pokja) ULP	
5.2.3.43.02.	Belanja Modal Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	
5.2.3.43.03.	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	
5.2.3.43.04.	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	
5.2.3.43.05.	Belanja Modal Konsultansi Perencanaan	
5.2.3.43.06.	Belanja Modal Konsultansi Pengawasan	
5.2.3.43.07.	Belanja Modal ATK/Dokumen/Administrasi	
5.2.3.43.08.	Belanja Modal Sertifikasi /Perijinan	
5.2.3.43.09.	Belanja Modal Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
5.2.3.43.10.	Belanja Modal Perjalanan Dinas Luar Daerah	
5.2.3.44.	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Peningkatan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	Belanja Modal Administrasi untuk rekening 52337
5.2.3.44.01.	Belanja Modal Kelompok Kerja (Pokja) ULP	
5.2.3.44.02.	Belanja Modal Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	
5.2.3.44.03.	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	
5.2.3.44.04.	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	
5.2.3.44.05.	Belanja Modal Konsultansi Perencanaan	
5.2.3.44.06.	Belanja Modal Konsultansi Pengawasan	
5.2.3.44.07.	Belanja Modal ATK/Dokumen/Administrasi	
5.2.3.44.08.	Belanja Modal Perjalanan Dinas Dalam Daerah	
5.2.3.44.09.	Belanja Modal Perjalanan Dinas Luar Daerah	
5.2.3.45.	Belanja Modal Peningkatan Kendaraan/Alat-Alat Angkutan, Peralatan dan Mesin	Untuk Belanja Modal Jasa dan Administrasi Pada Kode Rekening Ini Disesuaikan Dengan Pengelompokan Dalam Neraca, Yaitu Pada Kode Rekening 5.2.3.46 Belanja Modal Jasa dan Administrasi Rehabilitasi / Peningkatan Kendaraan/Alat-alat Angkutan, Peralatan dan Mesin
5.2.3.45.01.	Belanja Modal Peningkatan Alat Berat	
5.2.3.45.02.	Belanja Modal Peningkatan Alat - Alat Angkutan Darat	
5.2.3.45.03.	Belanja Modal Peningkatan Alat - Alat Angkutan Di Atas Air	
5.2.3.45.05.	Belanja Modal Peningkatan Alat - Alat Bengkel dan Keterampilan	
5.2.3.45.06.	Belanja Modal Peningkatan Alat - Alat Pengolah Pertanian, Peternakan dan Perikanan	
5.2.3.45.07.	Belanja Modal Peningkatan Peralatan/Perlengkapan Kantor	
5.2.3.45.08.	Belanja Modal Peningkatan Peralatan/Perlengkapan Rumah Tangga	
5.2.3.45.09.	Belanja Modal Peningkatan Alat-Alat Kedokteran/Kesihatan	
5.2.3.45.10.	Belanja Modal Peningkatan Alat-Alat Laboratorium	
5.2.3.45.11.	Belanja Modal Peningkatan Alat-Alat Pendukung Rumah Sakit	

KODE	U R A I A N	KETERANGAN
5.2.3.45.12.	Belanja Modal Peningkatan Alat-Alat Ukur	
5.2.3.45.13.	Belanja Modal Peningkatan Alat-Alat Pertambangan	
5.2.3.46.	Belanja Modal Jasa dan Administrasi Peningkatan Kendaraan/Alat-Alat Angkutan, Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Administrasi untuk rekening 5.2.3.45
5.2.3.46.01.	Belanja Modal Kelompok Kerja (Pokja) ULP	
5.2.3.46.02.	Belanja Modal Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	
5.2.3.46.03.	Belanja Modal Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	
5.2.3.46.04.	Belanja Modal Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	
5.2.3.46.05.	Belanja Modal Tenaga Kerja	
5.2.3.46.06.	Belanja Modal Konsultansi Perencanaan	
5.2.3.46.07.	Belanja Modal Konsultansi Pengawasan	
5.2.3.46.08.	Belanja Modal ATK/Dokumen/Administrasi	
5.2.3.47.	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	
5.2.3.47.01.	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	
5.2.3.47.02.	Belanja Modal Tanah BLUD Rumah Sakit	
5.2.3.47.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rumah Sakit	
5.2.3.47.04.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rumah Sakit	
5.2.3.47.05.	Belanja Modal Jalan Jaringan Irigasi BLUD Rumah Sakit	
5.2.3.47.06.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rumah Sakit	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SUTARMIDJI

E. KODE REKENING PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	KETERANGAN
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	DIGIT
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1 = Akun Pembiayaan
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	2 = Kelompok Pembiayaan
6.1.1.01.	Pelampauan penerimaan PAD	3 = Jenis Pembiayaan
6.1.1.01.01.	Pajak Daerah	4 = Objek Pembiayaan
6.1.1.01.02.	Retribusi Daerah	5 = Rincian Objek Pembiayaan
6.1.1.01.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.1.01.04.	Lain-Lain PAD yang sah	
6.1.1.01.05.	Pembagian Hasil PBB	
6.1.1.01.06.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
6.1.1.01.07.	dst.....	
6.1.1.02.	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	
6.1.1.02.01.	Bagi Hasil Pajak	
6.1.1.02.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
6.1.1.02.03.	dst.....	
6.1.1.03.	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
6.1.1.03.01.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	
6.1.1.03.02.	dst.....	
6.1.1.04.	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	
6.1.1.04.01.	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	
6.1.1.04.02.	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	
6.1.1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa	
6.1.1.04.04.	Belanja Modal	
6.1.1.04.05.	Belanja Bunga	
6.1.1.04.06.	Belanja Subsidi	
6.1.1.04.07.	Belanja Hibah	
6.1.1.04.08.	Belanja Bantuan Sosial	
6.1.1.04.09.	Belanja Belanja Bagi Hasil	
6.1.1.04.10.	Belanja Bantuan Keuangan	
6.1.1.04.11.	Belanja Belanja Tidak Terduga	
6.1.1.04.12.	Belanja Tidak Langsung	
6.1.1.04.13.	Belanja Langsung	
6.1.1.04.14.	Penghematan dari Pembiayaan	
6.1.1.04.15.	dst.....	
6.1.1.05.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	
6.1.1.05.01.	Uang jaminan	
6.1.1.05.02.	Potongan Taspen	
6.1.1.05.03.	Potongan Beras	
6.1.1.05.04.	Askes	
6.1.1.05.05.	SP2D yang Tidak Cair	
6.1.1.05.06.	dst.....	
6.1.1.06.	Kegiatan Lanjutan	
6.1.1.06.01.	Penyedia Lahan untuk Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pemerintahan	
6.1.1.06.02.	Pembangunan Jalan	
6.1.1.06.03.	Pembangunan dan rehabilitasi bangunan irigasi	
6.1.1.06.04.	Rehabilitasi tanggul kali laya	
6.1.1.06.05.	Rehabilitasi permanen saluran drainase/irigasi (penanggulangan pasca banjir)	
6.1.1.06.06.	dst.....	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
6.1.2.01.	Pencairan Dana Cadangan	
6.1.2.01.01.	Pencairan Dana Cadangan nomor	
6.1.2.01.02.	dst.....	
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6.1.3.01.	Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD	
6.1.3.01.01.	BUMD	
6.1.3.01.02.	dst.....	
6.1.3.02.	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	
6.1.3.02.01.	Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga	
6.1.3.02.02.	dst.....	
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	
6.1.4.01.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah	
6.1.4.01.01.	Penerusan pinjaman	
6.1.4.01.02.	dst.....	
6.1.4.02.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain	
6.1.4.02.01.	Pemerintah daerah	
6.1.4.02.02.	dst.....	
6.1.4.03.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank	
6.1.4.03.01.	Bank	
6.1.4.03.02.	dst.....	
6.1.4.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank	
6.1.4.04.01.	Lembaga keuangan bukan bank	
6.1.4.04.02.	dst.....	
6.1.4.05.	Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah	
6.1.4.05.01.	Obligasi	
6.1.4.05.02.	dst.....	
6.1.4.05.	Dst.....	
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.1.5.01.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
6.1.5.01.01.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.....	
6.1.5.01.02.	dst.....	
6.1.5.02.	Dst.....	
6.1.6.	Penerimaan piutang daerah	
6.1.6.01.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah	
6.1.6.01.01.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan pajak daerah	
6.1.6.01.02.	Penerimaan piutang daerah dari pendapatan retribusi daerah	
6.1.6.01.03.	Penerimaan piutang daerah dari lain-lain pendapatan yang sah	
6.1.6.01.04.	dst.....	
6.1.6.02.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	
6.1.6.02.01.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah	
6.1.6.02.02.	dst.....	
6.1.6.03.	Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain	
6.1.6.03.01.	Pemerintah daerah	
6.1.6.03.02.	dst.....	
6.1.6.04.	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank	
6.1.6.04.01.	Bank	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
6.1.6.04.02.	dst.....	
6.1.6.05.	Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank	
6.1.6.05.01.	Lembaga keuangan bukan bank	
6.1.6.05.02.	dst.....	
6.1.6.06.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
6.1.6.06.01.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
6.1.6.06.02.	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat	
6.1.6.06.03.	dst.....	
6.1.6.07.	Dst.....	
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.01.	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.1.01.02.	dst.....	
6.2.2.	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	
6.2.2.01.	Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)	
6.2.2.01.01.	Penyertaan Modal	
6.2.2.01.02.	dst.....	
6.2.2.02.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	
6.2.2.02.01.	Penyertaan Modal Kepada PT, Bank Kalbar	
6.2.2.02.02.	Penyertaan Modal Laba ditahan Pada PT, Bank Kalbar	
6.2.2.02.03.	dst.....	
6.2.2.03.	Badan usaha milik swasta	
6.2.2.03.01.	Pemberian Pinjaman	
6.2.2.03.02.	dst.....	
6.2.2.04.	Dana Bergulir	
6.2.2.04.01.	Dana Bergulir Kepada Kelompok Masyarakat	
6.2.2.04.02.	dst.....	
6.2.2.05.	Dst.....	
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	
6.2.3.01.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	
6.2.3.01.01.	Penerusan pinjaman	
6.2.3.01.02.	dst.....	
6.2.3.02.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah daerah lain	
6.2.3.02.01.	Pemerintah daerah	
6.2.3.02.02.	dst.....	
6.2.3.03.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank	
6.2.3.03.01.	Bank	
6.2.3.03.02.	dst.....	
6.2.3.04.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	
6.2.3.04.01.	Lembaga keuangan bukan Bank	
6.2.3.04.02.	dst.....	
6.2.3.05.	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	

KODE	URAIAN	KETERANGAN
6.2.3.05.01.	Penerusan pinjaman	
6.2.3.05.02.	dst.....	
6.2.3.06.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Pemerintah Daerah lain	
6.2.3.06.01.	Pemerintah daerah	
6.2.3.06.02.	dst.....	
6.2.3.07.	Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bank	
6.2.3.07.01.	Bank	
6.2.3.07.02.	dst.....	
6.2.3.08.	Pembayaran Pokok Utang sebelum Jatuh Tempo kepada Lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.08.01.	Lembaga keuangan bukan bank	
6.2.3.08.02.	Badan/Swasta/Lembaga	
6.2.3.08.03.	dst.....	
6.2.3.09.	Pelunasan Obligasi daerah pada saat jatuh tempo	
6.2.3.09.01.	Obligasi atas nama	
6.2.3.09.02.	Obligasi nomor	
6.2.3.09.03.	dst.....	
6.2.3.10.	Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo	
6.2.3.10.01.	Obligasi atas nama	
6.2.3.10.02.	Obligasi nomor	
6.2.3.10.03.	dst.....	
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	
6.2.4.01.	Pemberian Pinjaman daerah kepada Pemerintah	
6.2.4.01.01.	Pemerintah	
6.2.4.01.02.	dst.....	
6.2.4.02.	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah lain	
6.2.4.02.01.	Pemerintah daerah ...	
6.2.4.02.02.	Unit Kerja Pemerintah Daerah	
6.2.4.02.03.	dst.....	
6.3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.01.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.1.01.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
6.3.1.01.02.	dst.....	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

SUTARMIDJI